



**ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA DENGAN *VALUE FOR MONEY* BERDASARKAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR**

SKRIPSI

Dibuat Oleh

Putri Prisila

022119111

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JULI 2023**



**ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA DENGAN *VALUE FOR MONEY*  
BERDASARKAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA  
DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi  
( Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE.,  
CGCAE)

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**UJIAN SIDANG SKRIPSI**

Kami selaku Ketua Komisi dan Anggota Komisi telah melakukan bimbingan skripsi mulai tanggal : 17 Maret 2023 dan berakhir tanggal : 14 Juli 2023

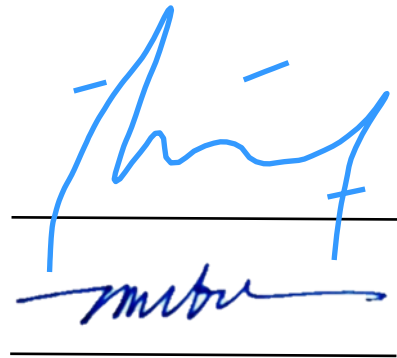
Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Putri Prisila (E/P\*)  
NPM : 022119111  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik  
Ketua Komisi : Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,  
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE  
Anggota Komisi : Sujatmiko Wibowo, ST., M.Ak  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Kinerja Dengan *Value For Money* Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor

Menyetujui bahwa nama tersebut di atas dapat disertakan mengikuti ujian skripsi yang dilaksanakan oleh pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Disetujui,

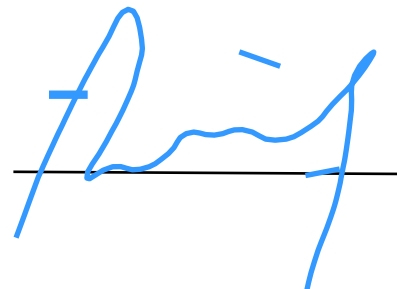
Ketua Komisi Pembimbing  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,  
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)



Anggota Komisi Pembimbing  
(Sujatmiko Wibowo, ST., M.AK)

Diketahui,

Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,  
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)



**ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA DENGAN *VALUE FOR MONEY*  
BERDASARKAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA  
DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023

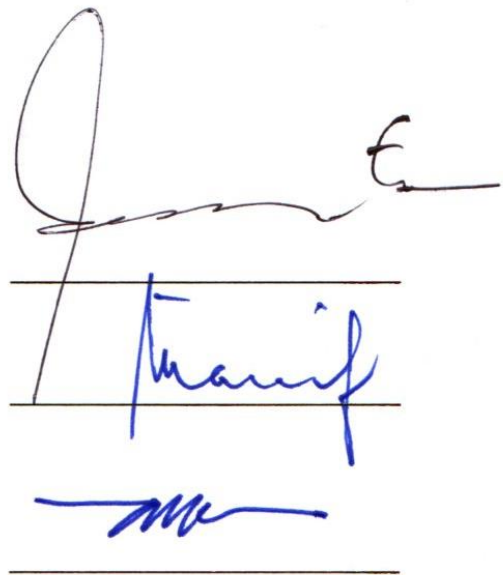
Putri Prisila  
022119111

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang  
(Dr. Edy Sudaryanto.,Drs.,Ak.,M.M)

Ketua Komisi Pembimbing  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak.,MBA.,CMA.,  
CCSA.,CA.,CSEP.,QIA.,CFE.,CGCAE)

Anggota Komisi Pembimbing  
(Sujatmiko Wibowo., ST.,M.Ak)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Prisila

NPM : 022119111

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Kinerja Dengan *Value For Money* Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi diatas adalah benar karya saya dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2023



Putri Prisila

022119111

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2023**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

PUTRI PRISILA, 022119111 Analisis Efektivitas Kinerja Dengan *Value For Money* Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor, dibawah bimbingan Bapak ARIEF TRI HARDIYANTO dan SUJATMIKO WIBOWO. 2023

Upaya untuk menerapkan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna serta bertanggungjawab dan berorientasi kepada yang akan terjadi, diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan untuk mengetahui taraf akuntabilitas tadi, diharapkan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut dilaporkan tentang program-program yang dilaksanakan sehingga dapat dievaluasi dan benar-benar mencerminkan program yang efektif dengan melihat target yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan. Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencapaian kinerja dan kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan menggunakan prinsip *value for money*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif eksploratif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran Dinas Pendidikan Kota Bogor yang ditinjau berupa anggaran dan realisasi pengeluaran secara umum telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik dalam LKjIP, dimana kegiatan pengelolaan anggaran menunjukkan pencapaian kinerja yang optimal yaitu sebesar 95,13% untuk tahun 2021. Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor yang ditinjau berupa indikator sasaran kegiatan secara umum telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik dalam LKjIP setiap indikator sasaran memiliki persentase capaian diatas 100%. Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan Kota Bogor pada program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dikategorikan ekonomis, efisien dan efektif.

Kata kunci : LKjIP, *Value for money*, ekonomis, efisiensi, efektivitas

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Adapun judul skripsi yang penulis jadikan topik dalam penulisan ini adalah “Analisis Efektivitas Kinerja Dengan Value For Money Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor”

Penulis juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas semua dukungantelah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak berikut :

1. Kepada orang tua penulis yang senantiasa selalu memberikan doa, kasih sayang dan dukungannya baik moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada kakak-kakak penulis yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungannya baik secara materi maupun secara moral selama proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEPM QIA., CFE., CGCAE Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan dan Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang senantiasa memberikan banyak bimbingan, motivasi, pengetahuan dan doa dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Sujatmiko Wibowo, ST.,M.Ak Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang senantiasa memberikan banyak bimbingan, motivasi, pengetahuan dan doa dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Pemilik NPM 022119108 terimakasih telah menjadi *support system* yang selalu mau direpotkan dan yang selalu mendengarkan semua keluh kesah selama proses penulisan skripsi, terimakasih selalu ada.
7. Kepada Rony Parulian dan Salma Salsabil selaku idola baru yang sangat saya idolakan, yang selalu menaikkan mood selama proses penulisan skripsi ini, terimakasih selalu menghibur dari layar kaca.
8. Kepada Rostigga Ananda, Nabila Putri Syahrani, Syalwa Aulia Saputri terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik selama proses penulisan skripsi ini, terimakasih sudah selalu menemani dalam semua kondisi, terimakasih atas dukungannya.
9. Teman-teman terkasih kepada Ferra, Bila, Bella, Putri Utami, Riani, Diniar, dan Mufida yang selalu mengajak *healing* disaat stress melanda selama proses penulisan skripsi dan selalu memberikan motivasi serta canda tawa selama proses penulisan skripsi.



10. Kepada Sebatang a.k.a *squad bawah tangga* yang walaupun jarang bertemu namun tetap selalu memberikan dukungannya serta memberikan hiburan saat bertemu selama proses penulisan skripsi.
11. Teman-teman HMA 2019 yang pernah berproses bersama dan memberikan pelajaran yang tidak didapat didalam kelas perkuliahan.
12. Last but not least, terimakasih banyak kepada diri sendiri yang telah berhasil menyelesaikan masa perkuliahan sampai akhir, dan sudah selalu berusaha untuk kuat selama proses penulisan skripsi yang tidak mudah. You did it!

Semoga semua bantuan, doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Bogor, Juli 2023

Penulis  
Putri Prisila

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN &amp; PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERLIMPAHAN HAK CIPTA</b> .....	v
<b>LEMBAR HAK CIPTA</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2    Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	7
1.2.1    Identifikasi Masalah .....	7
1.2.2    Rumusan Masalah .....	8
1.3    Maksud dan Tujuan Penelitian .....	8
1.3.1    Maksud Penelitian.....	8
1.3.2    Tujuan Penelitian.....	8
1.4    Kegunaan Penelitian .....	8
1.4.1    Kegunaan Praktis .....	8
1.4.2    Kegunaan Akademis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1    Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.1.1    Definisi Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.1.2    Tujuan Akuntansi Sektor Publik .....	11
2.2    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	12
2.2.1    Definisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	12
2.2.2    Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) .....	12

2.2.3	Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	13
2.2.4	Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	13
2.2.5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 14	
2.2.6	Format Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	14
2.3	Pengukuran Kinerja .....	16
2.3.1	Definisi Pengukuran Kinerja.....	16
2.3.2	Tujuan Pengukuran Kinerja .....	16
2.3.3	Siklus Pengukuran Kinerja.....	17
2.3.4	Elemen Pokok Pengukuran Kinerja .....	18
2.4	Indikator Kinerja .....	20
2.4.1	Definisi Indikator Kinerja .....	20
2.4.2	Peranan Indikator Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja .....	21
2.5	<i>Value For Money</i> .....	21
2.5.1	Definisi <i>Value For Money</i> .....	21
2.5.2	Langkah-langkah Pengukuran <i>Value For Money</i> .....	22
2.5.3	Indikator <i>Value For Money</i> .....	24
2.5.4	Manfaat Implementasi <i>Value For Money</i> .....	25
2.6	Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran .....	25
2.6.1	Penelitian Terdahulu.....	25
2.6.2	Kerangka Pemikiran.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>32</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	32
3.2	Objek, Unit, dan Lokasi Penelitian.....	32
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	32
3.4	Operasionalisasi Variabel .....	32
3.5	Metode Pengumpulan Data .....	33
3.6	Metode Pengolahan Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>37</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
4.1.1	Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Bogor.....	37
4.1.2	Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bogor .....	37
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Bogor .....	38

4.1.4	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Bogor	38
4.2	Analisis Efektivitas Kinerja Dengan <i>Value For Money</i> Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor.....	43
4.2.1	Proses Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 .....	43
4.2.2	Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pendidikan .....	48
4.2.3	Capaian Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan Kota Bogor Berdasarkan <i>Value For Money</i> .....	56
4.3	Pembahasan .....	72
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....		74
5.1	Simpulan.....	74
5.2	Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		77
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....		80
<b>LAMPIRAN</b> .....		81

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 .....	4
Tabel 2. 1 Perbedaan Dasar Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Swasta.....	11
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel.....	33
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Bogor .....	38
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kota Bogor .....	44
Tabel 4. 3 Serapan Anggaran Tahun 2021 .....	45
Tabel 4. 4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan 2021 Dinas Pendidikan Kota Bogor.....	49
Tabel 4. 5 Prestasi Siswa Per Jenjang.....	56
Tabel 4. 6 Perhitungan Nilai Ekonomis Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .	57
Tabel 4. 7 Jumlah Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2021 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi.....	62
Tabel 4. 8 Perhitungan Nilai Efisiensi Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2021 .....	63
Tabel 4. 9 Jumlah Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2021 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi .....	67
Tabel 4. 10 Perhitungan Nilai Efektivitas Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2021.....	67
Tabel 4. 11 Jumlah Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2021 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas .....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Siklus Pengukuran Kinerja.....	18
Gambar 2. 2 Value For Money Chain .....	25
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran .....	31
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bogor.....	39
Gambar 4. 2 APK dan APM SD/MI Kota Bogor Tahun 2021 .....	51
Gambar 4. 3 APK dan APM SMP/MTs Kota Bogor Tahun 2021 .....	52
Gambar 4. 4 TK, SD, SMP Terakreditasi A .....	52
Gambar 4. 5 Sarana dan Prasarana yang memadai .....	53
Gambar 4. 6 Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.....	54
Gambar 4. 7 Pendidikan Non Formal .....	55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keterangan Magang .....	81
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Upaya untuk menerapkan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna serta bertanggungjawab dan berorientasi kepada yang akan terjadi, diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan untuk mengetahui taraf akuntabilitas tersebut, diperlukan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan evaluasi utama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAB 1 ayat (1) menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja,

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pada BAB 1 ayat (1) menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia kearah yang lebih baik. Pendidikan diperlukan untuk membentuk peserta didik yang dapat mengembangkan perilaku, keterampilan serta kecerdasan intelektualnya agar menjadi insal yang terampil, cerdas dan berakhlak mulia.

Pemerintah memegang peranan pada menaikkan kualitas pendidikan Indonesia mulai dari ketersediaan sarana prasarana yang layak, meningkatkan profesionalisme guru serta menjalankan berbagai program kerja agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Pemerintah menjadi organisasi sektor publik terbesar harus bisa mengendalikan sektor publik lainnya yang dikelola oleh organisasi non pemerintah. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik berhubungan dengan kebutuhan masyarakat umum yang sangat perlu diawasi dan diatur penggunaannya.



Setiap daerah di Indonesia memiliki dinas pendidikannya masing-masing, hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan Pendidikan pada setiap daerahnya.

Visi Kota Bogor yaitu “Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”. Kota ramah keluarga dapat diartikan sebagai kondisi rumah keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, pendidikan, sosial masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Kondisi ramah keluarga juga harus dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuh kembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Untuk mencapai visi tersebut kemudia Pemerintah Kota Bogor menetapkan misi : (1) Mewujudkan Kota Bogr yang sehat ini merupakan suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni. Kota yang sehat dapat dicapai melalui Upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat. (2) Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman. Produktif, dan berkelanjutan. (3) Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera adalah suatu kondisi kota dumana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat merupakan tolak ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Dinas Pendidikan Kota Bogor memiliki visi terwujudnya masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan prima. Visi Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah selaras dengan misi Kota Bogor untuk mewujudkan kota yang cerdas. Namun, meskipun sudah selaras masih ada faktor penghambat terhadap pencapaian visi dan misi tersebut. Yang menjadi faktor penghambat yaitu Dinas Pendidikan Kota Bogor masih belum mempunyai sistem dan prosedur yang terstandar di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor saat ini pemanfaatannya belum optimal; Terbatasnya anggaran dan ketidak tepatan pengalokasian anggaran menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan pendidikan, kondisi letak geografis yang menyebabkan tingginya arus migrasi menyebabkan kompleksitas permasalahan Dinas Pendidikan Kota Bogor. Dinas Pendidikan Kota Bogor merupakan Instansi Pemerintah Kota Bogor yang berfokus pada pelayanan masyarakat khususnya di bidang pendidikan untuk meningkatkan pemerataan akses

dan mutu pendidikan formal dan non formal serta menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas untuk jenjang pendidikan formal dan non formal.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2021 terdapat isu-isu yang dibahas diantaranya isu strategis umum yang mencakup letak geografis Kota Bogor yang sebenarnya relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah JABODETABEK lainnya. Berdasarkan hal ini, Kota Bogor berpotensi menjadi tempat bermukim dan tempat wisata masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan pertumbuhan dan penambahan penduduk yang berdampak pada pelayanan pendidikan di Kota Bogor. Sumber daya manusia (SDM) masih terjadi ketidaksesuaian antara jabatan dan tugas dengan latar belakang pendidikan baik untuk tenaga structural maupun fungsional pendidikan baik yang terdapat di Dinas Pendidikan maupun ditingkat satuan pendidikan. Banyak tenaga pendidik (guru) yang kualifikasinya masih belum memenuhi standar. Program sertifikasi masih belum menjawab permasalahan pemenuhan kebutuhan guru atau tenaga fungsional Pendidikan yang memiliki kompetensi standar untuk masing-masing satuan Pendidikan. Anggaran yang masih terbatas untuk membentuk dan menyelenggarakan penjaminan mutu kebutuhan tenaga fungsional pendidikan khususnya guru yang telah lulus sertifikasi melalui pengembangan *suistanability improvement* dari hasil proses sertifikasi.

Sarana dan prasarana Pendidikan secara agregat kota, sebenarnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dilihat dari kualitas dan kuantitas di Kota Bogor telah memadai. Namun jika dilihat dari rasio di tingkat satuan pendidikan masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan jumlah siswa. Contohnya di beberapa sekolah rasio antar ruang kelas dengan rombongan belajar yang belum 1:1 atau dengan kata lain masih banyak sekolah yang ruang kelasnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan rombongan belajar. Anggaran pemerintah berasal dari multi sumber yang dialokasikan untuk pembangunan pendidikan di Kota Bogor jumlahnya dari tahun ke tahun belum sesuai dengan yang direncanakan. Dengan kata lain, anggaran pemerintah yang dari multi sumber tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah sehingga dengan sangat terpaksa pemerintah melakukan skala prioritas pembangunan untuk memenuhi kebutuhan khususnya untuk sektor pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Bogor masih belum mempunyai sistem dan prosedur pelayanan Pendidikan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, meskipun Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah merasa optimal dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, sistem dan prosedur pelayanan yang sudah ada pun belum tersosialisasikan dengan optimal.

Sedangkan isu strategis khusus yang terdapat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor mencakup penyelenggaraan

Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat belum terwujud sepenuhnya, belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, pendidikan semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan masih perlu ditingkatkan mutunya, pemerataan guru untuk semua jenjang belum tertata, lingkungan yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta, serta kurangnya ketersediaan data secara terpadu untuk mendukung perencanaan.

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana strategis disusun berdasarkan hasil analisis layanan Pendidikan yang dijabarkan dan diformulasikan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan. Dalam Undang-Undang No. 25 / 2004 tentang SPPN disebutkan secara jelas bahwa setiap rencana kerja (Renja) SKPD harus berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD sehingga untuk memudahkan penyusunan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD khususnya Renstra Dinas Pendidikan Kota Bogor ini telah diselaraskan dengan Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007.

Perumusan program dan kegiatan dimulai dengan memformulasikan prioritas kebijakan yang akan menjadi panduan penyusunan target/sasaran. Setelah kegiatan disusun berdasarkan sasaran yang akan dicapai, maka ditentukan program yang dapat menaungi kegiatan tersebut yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar, rencana kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Bogor dapat diklasifikasikan atas dua kelompok yaitu rencana non program yang dimana kegiatannya menyangkut kegiatan administrasi perkantoran dan rencana program yaitu kegiatan yang berhubungan langsung dengan upaya peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan.

Tabel 1. 1 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

No.	Indikator		Target
1	<b>Tujuan :</b>	Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas untuk setiap jenjang pendidikan	72,28%
2	<b>Sasaran :</b>	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal	
	1	APS 7-12	98,6%
	2	APS 13-15	78,6%

No.	Indikator		Target
	3	APM PAUD/RA	37,5%
	4	APM SD/MI/PAKET A	99,66%
	5	APM SMP/Mts/PAKET B	86%
3	<b>Program :</b>	<b>1. Program Pengelolaan Pendidikan</b>	
	1	APK PAUD/RA	50,5%
	2	APK SD/MI.PAKET A	113,5%
	3	APK SMP/MTS/PAKET B	104,8%
		<b>2. Program, Pengembangan Kurikulum</b>	
	1	Persentase kesiapan penyelenggaraan kurikulum sesuai dengan kebijakan nasional dan muata local daerah	100%
	2	Persentase kesiapan penyelenggaraan kurikulum pendidikan dasar sesuai dengan kebijakan nasional dan muatan local daerah1	100%
	3	Persentase kesiapan penyelenggaraan kurikulum PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan kebijakan nasional dan muatan local daerah	100%
		<b>3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	
	1	Persentase pendidik PAUD dengan Kualifikasi Minimal S1	68,9%
	2	Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi	21%
	3	Persentase tenaga pendidik SD yang memiliki kompetensi	55%
	4	Persentase tenaga pendidik SMP yang memiliki kompetensi	55%
	5	Jumlah PTK berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	20%
		<b>4. Program Pengendalian Pendidikan</b>	
	1	Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar oleh masyarakat yang sesuai dengan izin pendidikan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	100%

No.	Indikator		Target
	2	Persentase penyelenggaraan pendidikan PAUD dan Non Formal oleh masyarakat yang sesuai dengan izin pendidikan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	100%
		<b>5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra</b>	
	1	Persentase sekolah yang mengembangkan muatan lokal Bahasa sunda dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuleranya	100%
4	<b>Kegiatan :</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	
	1	Persentase sarana prasarana sekolah dasar berkondisi baik	94,8%
	2	Persentase SD Terakreditasi A	75%
	3	Persentase sekolah dasar sehat	17%
	4	Persentase siswa SD miskin yang mendapatkan bantuan sosial siswa miskin	94,8%

(Sumber : Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bogor)

Laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan Kota Bogor disusun untuk menyampaikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja, sebagaimana pada pengukuran kinerja terhadap rencana strategik tahun 2019-2024 dan rencana kinerja tahun 2021. Capaian kinerja dinilai dengan mengidentifikasi kendala-kendala dan penyebabnya dalam melaksanakan kegiatan, kemudian strategi untuk mengatasi kendala-kendala dalam rangka pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses dalam memperkirakan suatu aktivitas apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang sangat baik. Menilai kinerja pemerintah tidak sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang public dibelanjakan tetapi meliputi bahwa uang public yang dibelanjakan sudah secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan *value for money*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam PERMENPAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi pemerintah. Setelah lahirnya kedua peraturan tersebut terjadi perubahan nomenklatur dari istilah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diganti menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja

pemerintah selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah namun perubahan itu belum sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor karena judul laporan yang digunakan masih menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah padahal Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sudah menerangkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk tercapainya sasaran dan program yang terdapat pada perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2021, pemerintah Kota Bogor menganggarkan anggaran dengan jumlah setelah APBD perubahan sebesar Rp96.731.472.015 dengan realisasi sebesar Rp567.742.497.174. Dokumen perjanjian kinerja tersebut digunakan dasar untuk melaporkan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriyah (2020) menunjukkan secara keseluruhan kinerja kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dengan menggunakan data laporan kinerja instansi pemerintah 2019 yang ditinjau berupa anggaran, realisasi, secara umum telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik. Kegiatan pengelolaan anggaran menunjukkan pencapaian kinerja yang optimal yaitu sebesar 94,28% untuk tahun 2019.

Hal ini yang mendasari penulis tertarik melakukan penelitian mengenai akuntabilitas kinerja yang mencakup detail ukuran efektivitas kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Bogor. Oleh karena itu judul yang diambil untuk penelitian ini adalah “Analisis Efektivitas Kinerja Dengan *Value For Money* Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor.”

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kota Bogor merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk mengetahui proses penyusunan rencana kinerja dan menerangkan kinerja Dinas Pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk menjawab dan menerangkan taraf atau tingkat pencapaian yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor dari penjabaran visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Bogor, penilaian terhadap pencapaian kinerja dan sasaran melalui pengukuran terhadap indikator kinerja (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) efisiensi dan efektivitas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Menerangkan pencapaian kinerja keuangan yang sudah digunakan oleh Dinas Pendidikan dengan sasaran melalui pendekatan *Value for money*. Menjawab dan menerangkan informasi anggaran atau dana yang dibelanjakan oleh Dinas Pendidikan menghasilkan suatu nilai tertentu dengan indikator ekonomis, efisiensi dan efektif dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

## **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyusunan rencana kinerja tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Bogor?
2. Bagaimana tingkat pencapaian rencana kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Bogor?
3. Bagaimana capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kota Bogor berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan *Value For Money* ditinjau dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Rencana Kinerja Tahunan yang dijelaskan dalam program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga penulis dapat mengetahui fungsi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam mengukur tingkat efektivitas pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyusunan rencana kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Bogor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat capaian kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Bogor.
3. Untuk mengetahui capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2021 dengan menggunakan pendekatan *Value for money* ditinjau dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Sebagai bahan masukan terhadap SKPD/Dinas Pendidikan Kota Bogor terkait dengan kinerja organisasi juga untuk mengevaluasi dalam memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat serta untuk meninjau anggaran belanja yang digunakan.

### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Sebagai bahan masukan dalam peningkatan kualitas kinerja organisasi. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan atau referensi tentang akuntansi sektor publik khususnya pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bogor.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Sektor Publik**

##### **2.1.1 Definisi Akuntansi Sektor Publik**

Dalam waktu yang relatif singkat, akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga- lembaga sektor pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya. Sektor publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen negara. Dalam arti sempit diartikan sebagai pungutan negara. Akuntansi sektor publik juga merupakan sistem yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik.

Menurut Halim dan Kusufi (2018) Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Biduri (2018) Akuntansi Sektor Publik adalah suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan *turbulence*. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Sedangkan menurut Handayani (2019) dari pandangan ekonomi, organisasi publik didefinisikan sebagai Lembaga yang kegiatannya terkait dengan menyediakan barang publik dan hak masyarakat umum. Biasanya sektor publik sering disebut sebagai bidang yang berhubungan dengan pengelolaan negara. Namun dalam arti sempit juga disebut sebagai penerimaan negara atau organisasi yang menggunakan dana masyarakat.

Akuntansi publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis dan pembuatan laporan keuangan pada organisasi sektor publik dalam menghasilkan informasi finansial untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat menjelaskan bahwa organisasi sektor public bertujuan memberikan transparansi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara terbuka terkait dengan penggunaan dana publik. Seperti Lembaga pemerintah baik pusat dan daerah serta Lembaga lain yang tidak termasuk pemerintah seperti rumah sakit, perguruan tinggi dan lain sebagainya.

Adapun ciri-ciri dari organisasi sektor publik diantaranya : (1) dijalankan tidak

untuk mencari keuntungan finansial, (2) dimiliki secara kolektif oleh publik, (3) kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan, dan (4) keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus kalau organisasi pemerintahan melalui suatu badan legislatif.

Tabel 2. 1 Perbedaan Dasar Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Swasta

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
Tujuan	<i>Non profit oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Permodalan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dan lain-lain	Modal internal : modal pribadi, penjualan aset Modal eksternal : utang, obligasi, saham
Pertanggungjawab	Masyarakat dan parlemen	Pemegang saham dan kreditor
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk umum	Tertutup untuk publik
Sistem Akuntansi	<i>Cosh Accounting</i>	<i>Accrual Accounting</i>
Struktur Organisasi	Birokrasi, kaku hirarki	Fleksibel : datar, pyramid, lintas fungsional dan lain-lain

### 2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menciptakan benda serta pelayanan publik yang berguna untuk memenuhi kebutuhan serta hak publik. Dilihat dari tujuannya, akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta perbedaan yang menonjol adalah terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta lebih mementingkan untuk memaksimalkan laba (*profit motive*), sedangkan pada sektor publik tujuan utamanya bukan untuk memaksimalkan laba tetapi lebih mementingkan pelayanan publik (*public service*).

Berdasarkan *American Accounting Association* (1970), akuntansi publik memiliki tujuan yaitu :

#### 1. Kontrol Manajemen (*management control*)

Tujuan control manajemen adalah memberikan informasi berdasarkan kebutuhan dalam mengelola organisasi dengan cepat, efisien, tepat dan ekonomis atas operasional dan menggunakan sumber daya yang dialokasikan dalam suatu organisasi.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Memberikan informasi yang menguntungkan bagi manajer publik. Dapat diketahui bahwa dalam memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan pada tanggungjawab penggunaan sumber daya atau setiap bagian beradadibawah tanggungjawab manajer. Melalui akuntansi sektor publik dapat melaporkan kegiatan maupun penggunaan danaatau anggaran publik.

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengadaan manajemen, dan akuntabilitas. Dimana bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

### 2.2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

#### 2.2.1 Definisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja instansi pemerintah adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah untuk pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten. Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan produk akhir dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) berdasarkan siklus anggaran yang berjalan satu tahun. Dalam pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah suatu persentase. Manfaat laporan kinerja instansi pemerintah bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama satu tahun anggaran.

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, Menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodil dan melembaga. Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakannpada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan secara kurun waktu satu tahun.

#### 2.2.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bogor.
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 155 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat,
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

### **2.2.3 Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu, penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Prinsip lingkup pertanggungjawaban  
Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing serta membuat kegagalan dan keberhasilan.
2. Prinsip prioritas  
Hal-hal yang dilaporkan adalah hal-hal penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.
3. Prinsip manfaat  
Manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

### **2.2.4 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/Amanah. Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah adalah memberikan gambaran konkrit tentang capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam rencana kerja tahun sebelumnya. Laporan ini berisi tentang hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatannya.

Untuk itu setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat/public/*stakeholder* serta sejauh mana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi. Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) sebelumnya harus telah menyusun rencana strategis dimana didalamnya tertuang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dijabarkan setaip tahunnya melalui rencana strategis.

Selain itu, penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah kepada pihak yang berwenang juga bertujuan untuk memenuhi anatar lain :

1. Pertanggungjawaban dari unit yang loebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan.
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan undang-undang.

### **2.2.5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Pada Permen PAN Nomor 29 tahun 2010 (pasal 12) menjelaskan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategi instansi. Laporan kinerja sebagai dimaksud dalam pasal 12 berisi tentang ikhtisar pencapaian sasaran sebagai mana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan (Pasal 16 ayat 1). Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang (Pasal 16 ayat 2) :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi.
3. Penjelasan memadai atas pencapaian kinerja.
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Manfaat laporan kinerja yang diatur pada pasal 18 adalah sebagai berikut :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

### **2.2.6 Format Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Agar laporan kinerja instansi pemerintah dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan setiap instansi pemerintah. Format laporan kinerja instansi pemerintah ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat dalam laporan kinerja instansi pemerintah sehingga memudahkan perbandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan.

Laporan kinerja instansi pemerintah menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta tujuan

pemerintah. Disamping itu, aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh perlu dimasukkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah.

Format laporan kinerja instansi pemerintah minimal terdiri atas hal-hal berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh apa instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Bagian ini menyebutkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan hal-hal umum tentang instansi dan uraian singkat yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).

3. Rencana strategis

Bagian ini menjelaskan secara singkat mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Bagian awal bab ini menjelaskan secara singkat tentang sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi

4. Akuntabilitas kinerja

Bagian ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan hambatan kendala, permasalahan yang dialami serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil secara sistematis. Selain itu, akuntabilitas keuangan juga dilaporkan dengan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

5. Penutup

Penutup mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

6. Lampiran

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar dan aspek pendukung dimuat ke dalam lampiran.

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah harus dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan akan bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih dan produktivitas di lingkungan instansi pemerintah. Mengingat laporan kinerja instansi pemerintah merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja instansi pemerintah tersebut harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodic. Laporan kinerja instansi

pemerintah tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **2.3 Pengukuran Kinerja**

### **2.3.1 Definisi Pengukuran Kinerja**

Menurut Wibowo (2017) menyatakan bahwa “Pengukuran kinerja yang tepat” dapat dilakukan dengan cara :

1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi.
2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan.
3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitori tingkat kinerja.

Dalam Sedarmayantu (2017), Whittaker (1993) menyatakan bahwa “Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran”. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang aka nada seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cakup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah”.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi, karena sangat berguna untuk membandingkan kinerja organisasi periode lalu, periode sekarang dan strategi untuk mencapai visi dan misi organisasi tersebut. Pengukuran kinerja juga sangat penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan tugas yang lebih baik. Dalam proses pengukuran kinerja, organisasi sektor publik khususnya pemerintahan selalu focus pada pengukuran masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang hanya berfokus pada penjelasan aktivitas-aktivitas organisasi bukan pengukuran hasil (*outcome*) yang dapat menjelaskan dampak program-program pembangunan bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan organisasi sektor publik tidak mampu melihat keberadaannya sendiri bahwa organisasi sektor publik ada untuk melayani masyarakat.

### **2.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat pencapaian kinerja. Maka untuk dapat mencapai kinerja yang baik diperlukan adanya tujuan yang jelas. Bila dilakukan secara berkesinambungan pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan yang terus menerus akan mencapai keberhasilan yang perusahaan inginkan untuk kedepannya.

Sedangkan menurut Mahmudi (2010) tujuan dilakukan pengukuran kinerja di sektor publik adalah :

1. Mengetahui tingkat ketercapaian  
Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem penilaian kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi.
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya  
Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka Panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan dan hukuman. Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan *reward* misalnya tunjangan dan promosi atau hukumannya misalnya teguran
5. Memotivasi pegawai  
Adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh penghargaan. Penghargaan tersebut akan memotivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.
6. Menciptakan akuntabilitas publik  
Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

### 2.3.3 Siklus Pengukuran Kinerja

Uraian tahap siklus pengukuran kinerja :

1. Perencanaan strategik  
Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses perencanaan strategik yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program, operasional dan kegiatan atau aktivitas.
2. Penetapan indikator kinerja  
Setelah perumusan strategik, instansi pemerintah perlu menyusun dan menetapkan ukuran atau indikator kinerja. Ada beberapa aktivitas yang dilaksanakan dalam proses ini. Untuk beberapa jenis program tahapan ini mungkin mudah dan sederhana untuk didefinisikan. Indikator kinerja dapat berupa indikator *input*,



*output, outcome, benefit* atau *impact*. Indikator atau ukuran yang mudah adalah untuk aktivitas yang dapat dihitung.

3. Mengembangkan sistem pengukuran kinerja  
Ada tiga kegiatan dalam tahap ini. Pertama, harus yakin bahwa mempunyai data atau pencarian data yang diperlukan terus dilanjutkan sesuai dengan siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja harus mengumpulkan data. Ketiga, menggunakan data pengukuran kinerja yang dihimpun dan hal ini harus dipresentasikan dengan cara yang dapat dimengerti.
4. Penyempurnaan ukuran  
Pada tahap ini, pemikiran atas indikator hasil (*outcome*) dan indikator dampak (*impact*) menjadi lebih penting dibandingkan pemikiran atas indikator masukan (*input*) dan indikator keluaran (*output*).
5. Pengintegrasian dengan proses manajemen  
Pengintegrasian dengan proses manajemen yaitu pada saat pengukuran kinerja tersedia, tantangan selanjutnya adalah mengintegrasikan pengukuran kinerja dengan proses manajemen, Elvnia Desi (2017)



Gambar 2. 1 Siklus Pengukuran Kinerja  
(Sumber : Bastian 2007)

#### 2.3.4 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Menurut pendapat Mahsun (2013) elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain :

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi  
Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi

adalah cara atau Teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi.

3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi organisasi

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai sasaran atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.

4. Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan *feedback*, *reward* dan *punishment*, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atau laporan kinerja instansi pemerintah

Predikat capaian kinerja mengacu pada pedoman penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ditetapkan sebagai berikut :

90-100	Sangat baik
80-90	Baik
60-80	Cukup
50-60	Kurang
<50	Sangat kurang

Perhitungan persentase pencapaian dalam penetapan kinerja sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

## 2.4 Indikator Kinerja

### 2.4.1 Definisi Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan informasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja terhadap sasaran yang sudah direncanakan pada suatu program atau kegiatan. Selain itu, indikator kinerja berperan sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan (Mardiasmo 2018). Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2018) indikator kinerja yang akan dikembangkan hendaknya memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Sederhana dan mudah dipahami
2. Dapat diukur
3. Dapat dikuantifikasikan
4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja
5. Berfokus pada pelayanan pelanggan, kualitas dan efisiensi
6. Dikaji secara teratur

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen indikator kinerja. Menurut Halim dan Kusufi (2018) mengatakan bahwa indikator kinerja meliputi :

#### 1. Indikator *Input*

*Input* adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan *output* tertentu. *Input* dibagi menjadi dua, yaitu *input* primer dan *input* sekunder. *Input* primer berupa kas, sedangkan *input* sekunder berupa bahan baku, personel, infrastruktur dan masukan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tertentu.

#### 2. Indikator *Output*

*Output* adalah hasil langsung (keluaran) dari suatu proses. Pengukuran *output* adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas.

#### 3. Indikator *Outcome*

*Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat secara luas. *Outcome* lebih tinggi nilainya dari *output*, karena *output* hanya mengukur hasil (keluaran) tanpa mengukur dampaknya kepada masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan. Artinya *outcome*

adalah hasil sesungguhnya yang dicapai dari suatu program dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Penetapan indikator kinerja yang baik sangatlah penting karena indikator kinerja dapat dijadikan suatu dasar dalam mengukur suatu kinerja. Dengan adanya indikator kinerja kita dapat mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Oleh sebab itu, penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasikan.

#### **2.4.2 Peranan Indikator Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja**

Menurut Mardiasmo (2009) peranan indikator kinerja bagi pemerintah antara lain :

1. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi
2. Untuk mengevaluasi target akhir (*find outcome*) yang dihasilkan
3. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial
4. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan paling baik untuk mencapai target sasaran
5. Untuk menunjukkan standar kinerja
6. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran
7. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensi untuk dilakukan penghematan biaya.

### **2.5 Value For Money**

#### **2.5.1 Definisi Value For Money**

*Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara Bersama-sama. Kinerja keuangan sektor publik yang diukur berdasarkan metode *value for money* adalah pengukuran ekonomi yang diukur melalui rasio ekonomi, pengukuean efisiensi dengan rasio efisiensi dan pengukuran efektivitas dengan diukur melalui rasio aktivitas. *Value for money* merupakan suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

*Value for money* merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. *Value for money* yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Menurut Halim dan Kusufi (2018) *value for money* adalah konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi.

Menurut Mardiasmo (2018) *value for money* merupakan inti pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Menurut Mahmudi (2018) menyatakan bahwa *value for money* memiliki arti yaitu penghargaan terhadap nilai uang. Artinya, setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan dengan sebaik-baiknya.

### 2.5.2 Langkah-langkah Pengukuran *Value For Money*

Dalam mengimplementasikan konsep *value for money* pada pengukuran kinerja diperlukan pengembangan indikator kinerja. Indikator kinerja dikembangkan dari variable kunci yang berhasil diidentifikasi oleh organisasi untuk dapat diketahui tingkat capaian kerjanya. Indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Pengukuran kinerja *value for money* dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam *value for money* berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif sedangkan indikator ekonomis dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif.

Langkah-langkah pengukuran *value for money* menurut Mardiasmo (2002), yaitu :

#### 1. Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relative. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi yaitu :

- a. Apakah biaya organisasi lebih kecil dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
- b. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

Pengukuran ekonomi merupakan pengukuran yang bersifat relative. Ekonomi terkait dengan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan masukan (yang seharusnya). Artinya, pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Halim dan Kusufi (2018) menyatakan bahwa apabila sumber daya yang dikeluarkan berada di bawah anggaran maka terjadi penghematan, sebaliknya apabila diatas anggaran maka terjadi pemborosan.

Menurut Mahsum (2020) menyatakan bahwa pengukuran ekonomi membutuhkan data-data anggaran dan realisasinya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ekonomis suatu anggaran berdasarkan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu organisasi sektor publik.

Berikut rumus untuk mengukur tingkat ekonomi menurut Mahmudi (2010) :

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

*Input* : Realisasi Anggaran

Nilai *Input* : Anggaran

Kriteria ekonomi menurut Mahsum (2020) adalah :

- a. Apabila memperoleh hasil kurang dari 100% (< 100%) maka dinyatakan ekonomis.
- b. Apabila memperoleh hasil sama dengan 100% (= 100%) maka dinyatakan ekonomis berimbang.
- c. Apabila memperoleh hasil lebih dari 100% (> 100%) maka dinyatakan tidak ekonomis.

## 2. Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibandingkan dengan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Halim dan Kusufi (2018) menyatakan bahwa proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa apabila semakin besar *output* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Menurut Mahsun (2020) efisiensi ialah mengukur tingkat *input* terhadap tingkat *output* pada organisasi sektor publik. Dalam penelitian ini indikator *input* berupa capaian anggaran Dinas Pendidikan Kota Bogor. Kemudian untuk indikator *output* berupa capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Rumus menghitung tingkat efisiensi menurut Mahmudi (2010) :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

*Output* : Persentase hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan

*Input* : Persentase nilai ekonomi

Kriteria efisiensi menurut Mahsun (2002) adalah :

- a. Apabila memperoleh hasil kurang dari 100% (< 100%) maka dinyatakan tidak efisien.
- b. Apabila memperoleh hasil sama dengan 100% (= 100%) maka dinyatakan efisien berimbang.
- c. Apabila memperoleh hasil lebih dari 100% (> 100%) maka dinyatakan efisien.

## 3. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya

melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009).

Menurut Mahsun (2020) efektivitas merupakan mengukur tingkat *output* organisasi sektor publik terhadap target-target yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, yang menjadi indikator *output* adalah hasil atau realisasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Rumus menghitung tingkat efisiensi menurut Mahmudi (2010) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan :

*Outcome* : Persentase dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan

*Output* : persentase hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan

Kriteria efektivitas menurut Mahsun (2020) adalah :

- a. Apabila memperoleh hasil kurang dari 100% (<100%) maka dinyatakan tidak efektif.
- b. Apabila memperoleh hasil sama dengan 100% (= 100%) maka dinyatakan efektivitas berimbang.
- c. Apabila memperoleh hasil lebih dari 100% (> 100%) maka dinyatakan efektif.

### 2.5.3 Indikator *Value For Money*

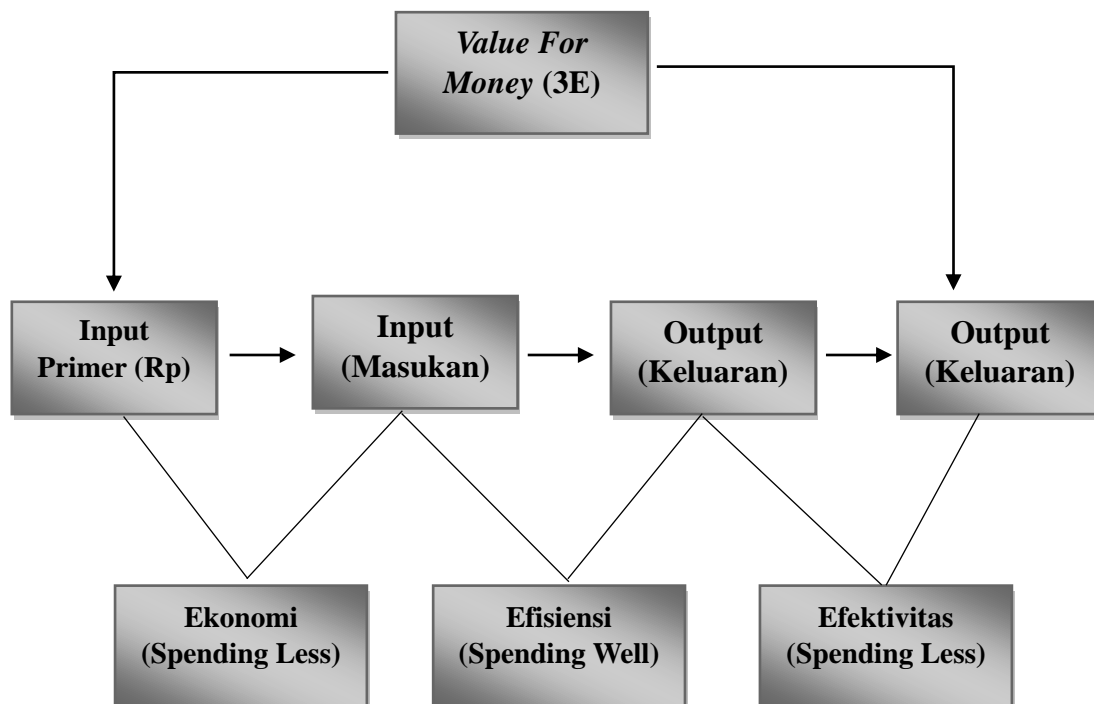
Indikator kinerja untuk memberikan ukuran atau gambaran pencapaian program secara pasti. Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa pengembangan indikator *value for money* dibagi menjadi dua yaitu :

#### 1. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)

Ekonomis adalah proses pembelian barang dan jasa *input* dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik (*spending less*). Ekonomi meliputi pengelolaan sumber daya masukan dengan hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Efisiensi adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai dengan penggunaan sumber dana serendah mungkin (*spending well*).

#### 2. Indikator kualitas pelayanan

Efektivitas yaitu kontribusi antara keluaran (*output*) dengan pencapaian sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Kegiatan suatu organisasi dapat dinilai efektif apabila proses (*output*) yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas menggambarkan dampak (*outcome*) yang dihasilkan dari *output* untuk mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan maka semakin efektif program suatu organisasi.



Gambar 2. 2 Value For Money Chain

(sumber : Buku Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti “Akuntansi Sektor Publik” Tahun 2010)

#### 2.5.4 Manfaat Implementasi Value For Money

Penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sector publik tentunya memberikan banyak manfaat, maka dari itu penerapan *value for money* sangat penting. Mahsun (2020) mengemukakan bahwa manfaat *value for money* sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu dan efektivitas pelayanan publik
2. Mampu menciptakan biaya pelayanan publik yang murah dengan menghilangkan segala bentuk inefisiensi dan melakukan penghematan *input*.
3. Alokasi belanja yang lebih berfokus kepada kepentingan publik
4. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

## 2.6 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

### 2.6.1 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan guna menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.



Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, "Judul Penelitian"	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Melatie Lie, 2015, "Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo"	Variabel Dependen (Pengukuran kinerja)	Pencapaian Kinerja	Kualitatif Deskriptif	Sistem pengukuran kinerja Badan Kepegawaian daerah Kota Palopo saat ini menggunakan LAKIP system ini dianggap tidak efektif dan system pengukuran kinerja kinerja yang saat ini digunakan belum sebuah pengukuran yang terintegrasi dengan tujuan strategik organisasi
2	Elvina Dewi Pratiwi, 2017, "Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Pada Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kowane Utara"	Variabel Independen (Pengukuran kinerja)  Variabel Dependen (LAKIP)	Pengukuran Kinerja	Kualitatif Deskriptif	Secara keseluruhan kinerja kegiatan Kantor Dinas Pariwisata Pemerintah Kowane Utara yang berupa anggaran, realisasi, pendapatan dan belanja secara umum telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik, kegiatan pengelolaan keuangan sudah menunjukkan capaian kinerja yang optimal sebesar 87%
3	Titik Widiyastuti, 2018, "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bonyolali"	Variabel Independen (Pencapaian Kinerja)  Variabel Dependen (LAKIP)	Pengukuran Kinerja	Kualitatif Deskriptif	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bonyolali dalam melaksanakan tugasnya secara makro dapat dikaitkan berhasil karena dalam 7 target sasaran yang telah ditetapkan rata-rata dicapai dengan baik.

No.	Nama, Tahun, "Judul Penelitian"	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4	Perpetua Saras Wulansuci, 2017, "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010	Variabel Independen (LAKIP)  Variabel Dependen (PERMENPAN DAN RB)		Deskriptif Komparatif	Berdasarkan hasil analisis data, LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Unsur yang tidak dapat dipenuhi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman adalah ikhtisar eksekutif, terdapat tiga unsur yang tidak sesuai dengan format pada peraturan pengimplementasian format penyesunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman belum optimal.
5	Windi Pratiwi, 2020, "Pengaruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Terhadap Peningkatan Kinerja Instansi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen (LAKIP)  Variabel Dependen (Peningkatan Kinerja Instansi di BPSDM)	Pengukuran Kinerja	Kualitatif Deskriptif Analitik	Badan Pengembangan SDM Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan LAKIP dengan baik, hasil analisis atas penyebaran kuisioner menunjukkan bahwa LAKIP yang diukur dengan indicator isi LAKIP berada dalam kategori baik, LAKIP mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja Badan SDM Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama, Tahun, "Judul Penelitian"	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
6	Nur Fitriyah, 2020, "Analisis Efektivitas Kinerja Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor	Variabel Independen (Pelayanan Kinerja)  Variabel Dependen (LAKIP)	Pengukuran Kinerja	Deskriptif Eksploratif	Berdasarkan hasil penelitian kinerja anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor menunjukkan pencapaian kinerja yang optimal sebesar 94.2% kinerja dari kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bogor dikategorikan sangat baik
7	Yosie Dwinanda, 2018, "Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	Variabel Independen (Value For Money)  Variabel Dependen (Pengukuran Kinerja)	Pengukuran kinerja keuangan berbasis value for money	Deskriptif komparatif	Kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dari seluruh kegiatan pada tahun 2013-2017 menunjukan kinerja yang ekonomis, cukup efisien dan kurang efektif.
8	Nur Zeni Amalia Putri, 2020, "Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur"	Variable Independen (Value For Money)  Variable Dependen (Pengukuran Kinerja)	Pengukuran kinerja keuangan berbasis value for money	Deskriptif Kualitatif	Kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada program Kesehatan masyarakat dan program perbaikan gizi masyarakat tahun 2016 dan 2017 sudah sangat baik, pada tahun 2018 hanya program perbaikan gizi yang dikategorikan sangat baik, analisis value for money pada kinerja keuangan Dinas Kesehatan masyarakat dinyatakan sudah ekonomis, efisien dan kurang efektif

No.	Nama, Tahun, "Judul Penelitian"	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
9	Nabilah Tyas Garini, 2021, "Analisis Value For Money Pada LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau"	Variabel Independen (Value For Money) Variabel Dependen (LAKIP)	Pengukuran kinerja keuangan berbasis value for money	Kualitatif Deskriptif	Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019 pada Pendidikan menengah dikategorikan ekonomis, cukup efisien, kurang efektif. Program manajemen pelayanan Pendidikan dikategorikan ekonomis, efisien dan kurang efektif. Program Pendidikan khusus dikategorikan ekonomis, efisien dan kurang efektif. Sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum sesuai dengan prinsip <i>value for money</i>
10	Padla Aulia Hadiyanti, 2017, "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Oku Timur"	-	-	Deskriptif kualitatif	Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Oku Timur tahun 2015 telah disajikan belum sesuai dengan pedoman peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaannya yang pertama terdapat pada objek penelitiannya. Dari 10 penelitian terdahulu yang tercantum pada tabel tersebut semuanya menggunakan objek penelitian menggunakan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) atau sebelum ada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 biasa disebut laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Perbedaannya terletak pada tahun dan unit analisis yang digunakan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan unit analisis Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan objek penelitian laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2021.

Persamaan berikutnya terdapat pada pendekatan yang digunakan. Dari 10 penelitian terdahulu, terdapat 3 penelitian yang meneliti capaian keuangan

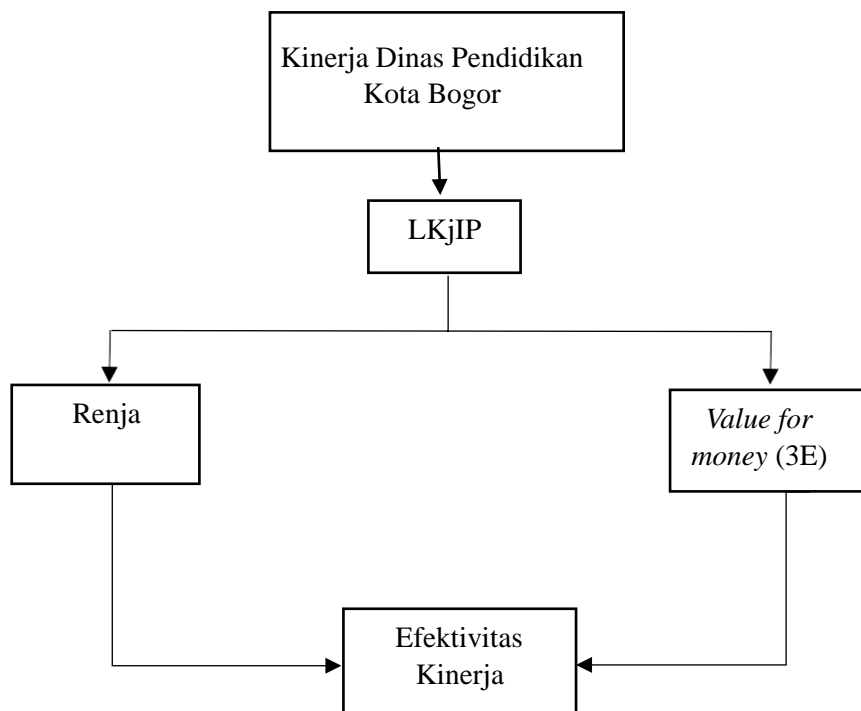
menggunakan pendekatan *value for money* yang meninjau capaiannya dengan menggunakan 3E yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Untuk menganalisis pendekatan *value for money* ini secara teori 3 peneliti terdahulu dengan penelitian ini menggunakan teori yang sama.

### 2.6.2 Kerangka Pemikiran

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah disusun secara periodik. Media yang dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang. Melalui media inilah secara permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Tujuan dan manfaat laporan kinerja instansi pemerintah adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi amanah dengan demikian laporan kinerja instansi pemerintah merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan amanah yang diterima instansi pemerintah tersebut. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana tingkat efektivitas kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Bogor apakah sudah berjalan sesuai dengan visi dan misinya serta memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Bogor. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya akan menganalisis tingkat kinerja non keuangan dan kinerja keuangan dengan konsep *value for money* berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2021. Pada *value for money* bisa dilihat apakah kinerja keuangan itu sudah bersifat ekonomis, efektivitas dan efisien serta apakah anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah memberikan *value* (nilai) bagi masyarakat Kota Bogor.



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena. Dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala, atau keadaan, metode yang digunakan dengan cara mengamati objek tertentu dan dengan waktu yang ditentukan untuk mengetahui kinerja organisasi secara langsung

#### **3.2 Objek, Unit, dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian adalah topik permasalahan yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*. Unit analisis *organization* adalah sumber data yang unit analisisnya merupakan suatu organisasi atau perusahaan yaitu berupa Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada Jalan Raya Pajajaran No.125 RT 01/ RW 05, Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

##### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini data yang akan diambil adalah jenis data kualitatif karena data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan data pelaporan berupa laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang bersumber langsung dari Dinas Pendidikan Kota Bogor dan data hasil observasi berupa uraian atau penjelasan mengenai efektivitas kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data diperoleh dari hasil observasi pada Dinas Pendidikan Kota Bogor, dokumentasi mengenai laporan-laporan yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

#### **3.4 Operasionalisasi Variabel**

Penelitian ini menganalisis secara deskriptif mengenai laporan kinerja instansi pemerintah sebagai alat ukur efektivitas kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Bogor. Oleh karena itu, perlu dilakukan dokumentasi serta observasi dalam pengambilan data.

Analisis Efektivitas Kinerja dengan *Value For Money* Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Analisis efektivitas kinerja	Rencana kinerja	- Sasaran kegiatan atau program kerja	Nominal
<i>Value For Money</i>	Akuntabilitas keuangan	- Ekonomi = $\text{Realisasi} \times 100\% \text{ Anggaran}$ - Efisiensi = $\frac{\% \text{ capaian kinerja}}{\% \text{ capaian anggaran}} \times 100\%$ - Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$	Rasio
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Capaian indikator kinerja	- Persentase pencapaian kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ - Indikator kinerja kegiatan ( <i>input, output, outcome, benefit, impact</i> )	Rasio

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data maka metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling vital dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2018) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari *settingnya*, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden pada suatu seminar, diskusi, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder.

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), kuisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

Menurut Yusuf (2014) keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data sebelum peneliti yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial



uang diteliti mampu menjawab rumusan masalah dari peneliti sehingga ketepatan dan kredibilitas tidak diragukan oleh siapapun. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono (2018) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Menurut Yusuf (2014) kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati. Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks yang alami, ialah yang bertanya dan juga melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya.

#### 2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya data atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada. Tetapi tidak semua dokumen memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto bisa saja dibuat untuk kepentingan tertentu. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah dokumen yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bogor berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh adanya suatu dokumen.

### **3.6 Metode Pengolahan Data**

Analisis data menurut Sugiyono (2018) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2017) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahannya tenaga fisik dan pikiran sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori.

Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

### 1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018) reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

### 2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *flowchart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018)

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian

berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Anggaran 2021. Dinas Pendidikan Kota Bogor ini yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No. 125 Bogor 16153.

##### **4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Bogor**

Dinas Pendidikan Kota Bogor sebagaimana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Bogor. Pembentukan Dinas Pendidikan Kota Bogor merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan sebagaimana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Untuk menyelesaikan keinginan dan harapan, rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara jelas dan praktis serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bogor diperlukan upaya peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat agar masyarakat bisa merasakan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor serta masyarakat pun mengetahui sistem dan layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor.

##### **4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bogor**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bogor menetapkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**VISI :** “Terwujudnya masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan prima”

**MISI :**

1. Meningkatkan kapasitas layanan pendidikan
2. Meningkatkan kualitas dan relevansi Pendidikan
3. Meningkatkan daya saing pada semua jenjang pendidikan
4. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan

#### 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Bogor

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Bogor didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dengan hasil akhir.

**Tujuan :** Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal

**Sasaran :** Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas untuk jenjang pendidikan formal dan non formal

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Bogor

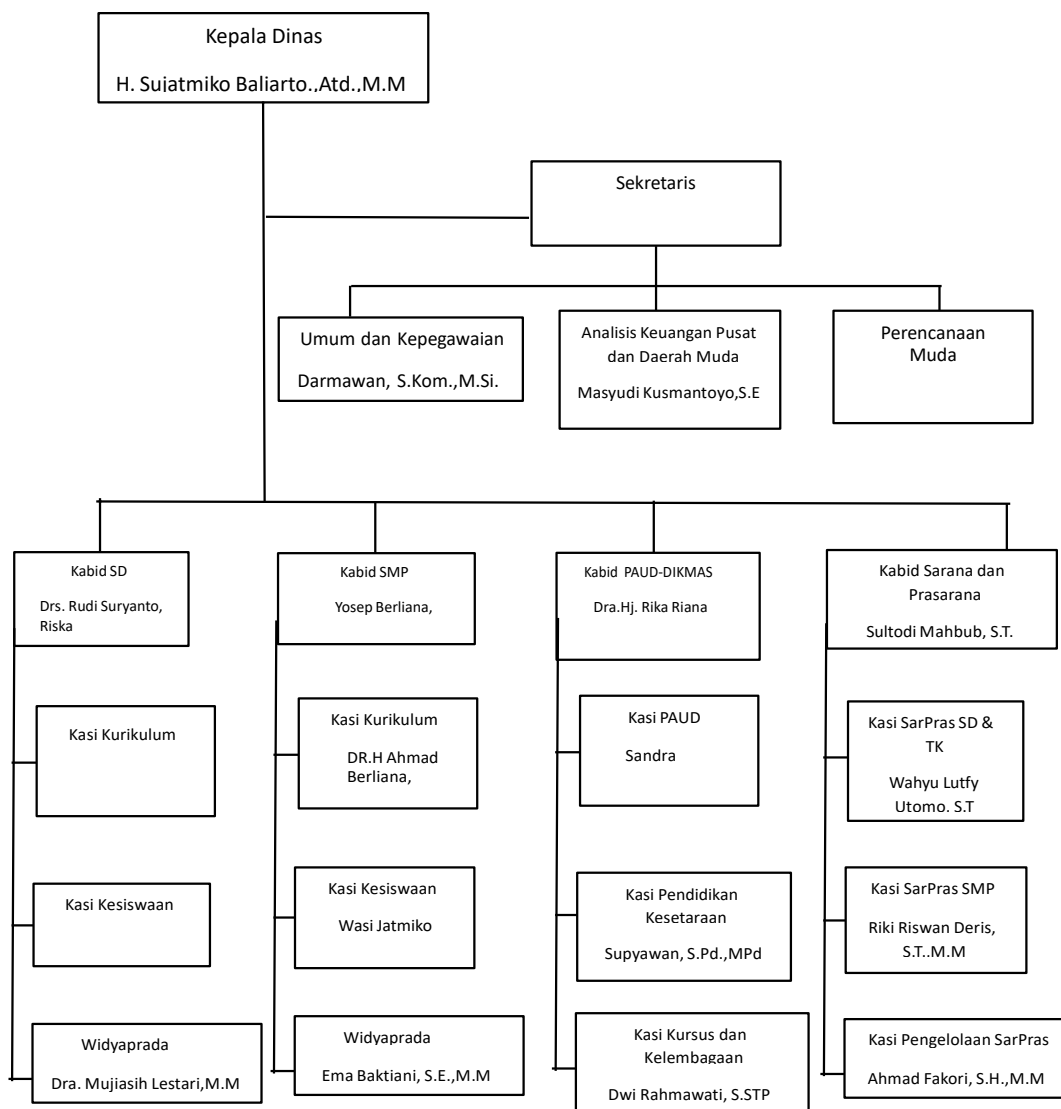
Tujuan dan Sasaran		Indikator kinerj/tujuan/sasaran/program/kegiatan
Tujuan	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu Pendidikan formal dan non formal	1. Rata-rata lama sekolah 2. Harapan lama sekolah
Sasaran	Tersedianya Layanan Pendidikan yang berkualitas untuk Jenjang Pendidikan formal dan non formal	1. APS 7-12 2. APS 13-15 3. APM PAUD/RA 4. APM SD/MI/Paket A 5. APM SMP/Mts/Paket B

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Bogor)

#### 4.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Bogor

Pembentukan Dinas Pendidikan Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 155 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah tanggal 26 Desember 2021 tentang tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan structural di lingkungan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Bogor mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan, yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Untuk melakukan tugas pokok tersebut dinas pendidikan mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bogor

(sumber : <https://disdik.kotabogor.go.id>)

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing masing bagian adalah sebagai berikut :

### 1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, yaitu :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas kedinasan yang meliputi sekretariat, bidang sekolah dasar, bidang sekolah menengah pertama, bidang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat, bidang sarana dan prasarana serta UPTD satuan pendidikan formal dan non formal
- b. Mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.

- c. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pendidikan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan
- c. Pelaksanaan evaluasi di bidang pendidikan
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan bidang pendidikan.

## **2. Sekretaris Dinas**

Sekretaris dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, yaitu :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas sekretarian yang meliputi sub bagian umum dan kepegawaian, analisis keuangan pusat dan daerah muda, perencanaan muda
- b. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan serta mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
- c. Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dinas
- e. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan lingkup sekretariat
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana, penganggaran dan evaluasi kinerja di lingkup dinas
- b. Pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup dinas
- c. Pelaksanaan tugas administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah kota dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup dinas.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas.

## **3. Kasubag Umum dan Kepegawaian**

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, yaitu :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan
- c. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan sub bagian umum dan kepegawaian
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- e. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian

Kasubag umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian
- b. Pengelolaan kearsipan, kerumahtangaan dan perlengkapan di lingkungan dinas
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup sub bagian umum dan kepegawaian.

#### **4. Kabid**

Kabid mempunyai tugas untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, yaitu :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas yang meliputi kasi kurikulum, kasi kesiswaan dan widyaprada.
- b. Mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan
- c. Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang sekolah dasar
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- f. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Adapun fungsi dari kabid, yaitu :

- a. Perumusan konsep kebijakan daerah
- b. Penyusunan rencana kerja
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan
- d. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala perangkat daerah yang berkaitan dengan tugasnya.



## 5. Kasi Kesiswaan

Kasi kesiswaan mempunyai tugas untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, yaitu :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas kasi kesiswaan
- b. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan
- c. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan urusan kesiswaan
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- e. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan
- f. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas tugas kedinasan lainnya.

Adapun fungsi dari kasi kesiswaan sekolah dasar, yaitu :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada urusan kesiswaan
- b. Pelaksanaan kegiatan standarisasi, teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kesiswaan
- c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pada urusan kesiswaan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesiswaan

## 6. Kasi kurikulum

Kasi kurikulum mempunyai tugas untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, yaitu :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas kasi kurikulum
- b. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan
- c. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan urusan kurikulum
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- e. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan
- f. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja

Untuk melaksanakan tugasnya, kasi kurikulum sekolah dasar mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada urusan kurikulum
- b. Pelaksanaan kegiatan standarisasi, teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman pengembangan kurikulum nasional dan muatan lokal
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal di
- d. Pengumpulan, pengolahan dan Analisa data pada urusan kurikulum
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan kurikulum

## 7. Kabid Sarana dan Prasaran

Kabid prasarana dan prasarana mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pada bidang pendidikan yaitu :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana yang meliputi kasi sarana prasarana taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama
- b. Mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan
- c. Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas kapid sarana prasarana
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- f. Memberikan sarana pertimbangan kepada atasan
- g. Melaksanakan mentoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana

Untuk melaksanakan tugasnya, kapid sarana prasarana mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana, dan perumusan konsep kebijakan daerah di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan masyarakat.
- b. Penyusunan rencana kerja di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan masyarakat.
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usai dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan masyarakat
- d. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sarana dan prasaran pendidikan anak usia dini, taman kana-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan masyarakat
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan masyarakat
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sarana dan prasaran pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan masyarakat

## **4.2 Analisis Efektivitas Kinerja Dengan *Value For Money* Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor**

### **4.2.1 Proses Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021**

Perencanaan kerja berhubungan dengan masa yang akan datang, implikasi perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi/prediksi, penjadwalan kegiatan, monitoring dan evaluasi. Rencana kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan sistematis yang dibuat untuk rentan waktu yang telah ditentukan suatu organisasi. Rencana kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Rencana kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi.

Untuk melihat efektivitas kinerja dari perencanaan kerja, maka terlebih dahulu dapat ditelusuri sejauh mana rencana strategis yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Sedangkan untuk menyusun rencana strategis yang ada, dengan mengacu pada visi dan misi organisasi Dinas Pendidikan Kota Bogor. Berdasarkan rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2019-2024 tentang visi, misi, tujuan dan strategi serta kebijakan menyebutkan bahwa visi Dinas Pendidikan yaitu “Terwujudnya masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan prima.” Sedangkan misi Dinas Pendidikan Kota Bogor yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas layanan pendidikan
2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan
3. Meningkatkan daya saing pada semua jenjang pendidikan
4. Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.

Terlepas dari visi dan misi organisasi Dinas Pendidikan Kota Bogor, maka selanjutnya akan disusun tugas pokok dan fungsi atau tupoksi Dinas Pendidikan Kota Bogor. Dari tupoksi tersebut akan terlihat jelas arah tujuan kerja dari Dinas Pendidikan. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan adalah mengelola semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di Kota Bogor.

Berdasarkan rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2019-2024, ditetapkan indikator kunci utama (IKU) dari masing-masing sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kota Bogor

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2021)	Persentase Capaian
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,30	10,53	102%
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,38	13,42	100%

(sumber: dokumen indikator kunci utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bogor)

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rata-rata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.

Permasalahan perlambatan angka rata-rata lama sekolah di Kota Bogor dikarenakan oleh masih adanya pendudukan berusia >25 tahun yang tidak taman SMP dan SMA. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang perlu dilakukan oleh Kota Bogor adalah upaya untuk menekan angka putus sekolah pada jenjang SMP dan SMA serta mengintensifikan program kejar paket A, paket B, dan paket C melalui pengembangan PKBM di wilayah-wilayah.

Harapan lama sekolah atau *expected years of schooling* didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh 36 setiap anak. Harapan lama sekolah (HLS) menggunakan Batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP (*United Nations Development Programme*) yaitu batas maksimum sebesar 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 tahun.

Rencana kerja inilah yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Pendidikan mendapat dukungan anggaran dari APBD dan APBN yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Serapan Anggaran Tahun 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>	<b>596.731.472.015,0</b>	<b>567.742.497.174,0</b>	<b>95.14</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>365.147.216.017,0</b>	<b>353.680.893.775,0</b>	<b>96.86</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	365.126.122.017,0	353.660.753.775,0	96.86
	Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Reaslisasi Anggaran	21.094.000,00	20.140.000,00	95.48
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.006.498.600,00</b>	<b>807.319.676,00</b>	<b>80.21</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	98.195.600,00	97.454.200,00	99.24
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.500.000,00	15.500.000,00	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.425.000,00	93.075.000,00	89.99
	Penyediaan Barang Cekatan dan Penggandaan	107.080.000,00	105.310.000,00	98.35
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	682.298.000,00	495.980.476,00	72.69
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>383.918.300,00</b>	<b>378.500.450,00</b>	<b>98.59</b>

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	383.918.300,00	378.500.450,00	98.59
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.250.498.072,00</b>	<b>963.135.020,00</b>	<b>77.02</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	468.000.000,00	198.835.986,00	42.49
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	782.498.072,00	764.299.034,00	97.67
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.105.250.000,00</b>	<b>1.091.580.281,00</b>	<b>98.76</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.060.000,00	121.845.800,00	95.15
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	246.040.000,00	245.414.200,00	99.75
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	731.150.000,00	724.320.281,00	99.07
<b>6</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>151.863.995.701,00</b>	<b>144.670.282.966,00</b>	<b>95.26</b>
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	12.214.704.566,00	11.182.892.250,00	91.55
	Penambahan Ruang Kelas Baru	606.910.000,00	589.637.834,00	97.15
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	400.600.000,00	397.973.786,00	99.34
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.886.633.457,00	2.846.868.367,00	98.62
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5.629.862.820,00	5.422.931.205,00	96.32
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	221.721.000,00	221.277.763,00	99.80
	Pengadaan Mebel Sekolah	3.067.309.700,00	2.896.527.490,00	94.43
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.418.440.000,00	2.416.130.000,00	99.90
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	595.065.800,00	451.608.600,00	75.89
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	53.810.000,00	53.679.200,00	99.76

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.866.172.364,00	4.796.317.343,00	98.59
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	233.305.800,00	228.842.800,00	98.09
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	163.313.600,00	145.810.800,00	89.20
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	292.388.000,00	279.992.800,00	95.76
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	118.213.758.594,00	112.738.789.728,00	95.37
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.313.129.505,00	44.785.820.465,00	89.01
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	2.379.255.000,00	1.709.664.341,00	71.86
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sara, Prasarana dan Utilitas Sekolah	314.446.000,00	305.645.124,00	97.20
	Pengadaan Mebel Sekolah	1.019.958.500,00	993.642.771,00	97.42
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6.811.130.000,00	6.800.140.000,00	99.84
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	313.528.000,00	291.636.000,00	93.02
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.297.168.000,00	1.258.086.900,00	96.99
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.862.869.270,00	2.749.530.342,00	96.04
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.138.359.000,00	1.066.721.400,00	93.71
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	230.702.000,00	211.613.000,00	91.73
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	400.080.600,00	340.482.800,00	85.10
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	33.545.633.135,00	29.058.657.786,00	86.62
<b>8</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>12.090.886.820,00</b>	<b>9.845.957.841,00</b>	<b>81.43</b>
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	300.000.000,00	298.955.909,00	99.65

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	305.000.000,00	305.000.000,00	100.00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	110.924.624,00	103.645.936,00	93.44
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	2.387.970.396,00	2.371.083.396,00	99.29
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	486.217.800,00	406.098.600,00	83.52
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	36.574.000,00	36.574.000,00	100.00
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	8.464.200.000,00	6.323.700.000,00	74.71
<b>9</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>13.570.079.000,00</b>	<b>11.519.906.700,00</b>	<b>84.89</b>
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30.000.000,00	30.000.000,00	100.00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2.967.060.000,00	2.594.806.500,00	87.45
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	550.780.000,00	550.780.000,00	100.00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	843.139.000,00	838.817.000,00	99.49
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	9.179.100.000,00	7.505.503.200,00	81.77
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.456.988.100,00</b>	<b>2.244.490.590,00</b>	<b>91.35</b>
<b>10</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.456.988.100,00</b>	<b>2.244.490.590,00</b>	<b>91.35</b>
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.456.988.100,00	2.244.490.590,00	91.35
		599.188.460.115,00	569.986.987.764,00	95.13

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kota Bogor)

#### 4.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah menetapkan target pada setiap indikator sarannya. Hal ini memudahkan peneliti dalam menghitung persentase capaian

kinerja pada setiap indikator sasaran yang tercantum pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Bogor. Capaian kinerja merupakan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator sasaran yang memiliki persentase 90%-100% yang menyatakan sangat baik dan hanya Sebagian kecil indikator sasaran yang memiliki nilai persentase 60%-80% yang menyatakan cukup.

Perhitungan capaian kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Bpgpr masih ada yang menunjukkan persentase dibawah 60%. Maka secara keseluruhan target kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor telah tercapai dengan baik namun masih ada yang perlu ditingkatkan lagi dalam pencapaiannya. Adapun mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan 2021 Dinas Pendidikan Kota Bogor

<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Persentase Capaian</b>
Persentase APK PAUD	50,00%	50,20%	100%
Persentase APK SD	113,00%	105,98%	94%
Persentase APM SD	108,50%	99,64%	92%
Persentase APK SMP	104,30%	106,04%	102%
Persentase APM SMP	94,60%	84,95%	90%
Persentase Tk Terakreditasi A	40,00%	40,00%	100%
Persentase SD Terakreditasi A	75,00%	51,96%	69%
Persentase SMP Terakreditasi A	75,00%	51,96%	69%
Persentase sarana prasarana SD yang memadai	94,50%	95,21%	101%
Persentase sarana prasarana SMP yang memadai	94,80%	96,65%	102%
Persentase Pendidik PAUD dengan Kualifikasi minimal S1	68,40%	69,88%	102%
Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi	20,00%	47,29%	236%
Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikasi kompetensi	54,00%	46,68%	86%
Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikasi kompetensi	54,00%	54,22%	100%
Jumlah Pendidik/Tutor berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	2,00%	0,00%	*



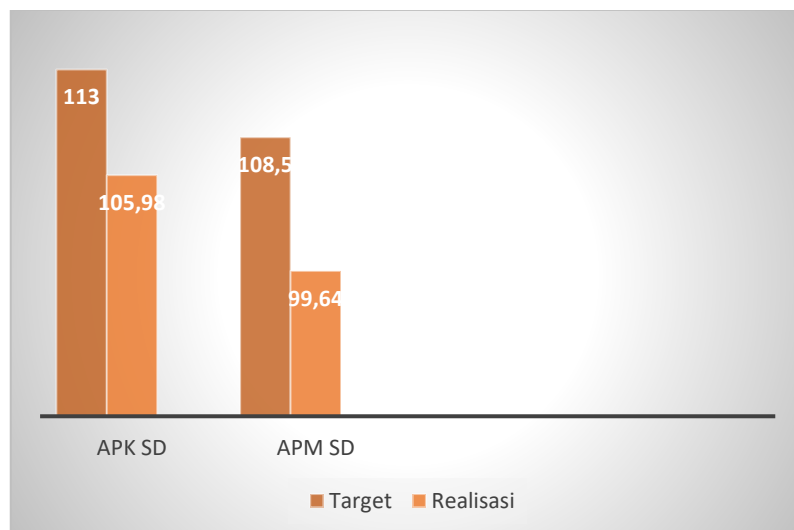
Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
Nilai rata-rata Ujian Akhir Berstandar Nasional SD	68,14%	0,00%	**
Nilai rata-rata Ujian Nasional Tingkat SMP	58,30%	0,00%	***
Persentase Paud Non Formal (SKB/KB/TPA) yang terakreditasi	34,00%	35,77%	105%
Persentase PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi	42,00%	44,40%	106%
Persentase LKP (Lembaga Kursus Pendidikan) yang terakreditasi	33,00%	35,40%	107%
Jumlah siswa berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional	68%	227,00%	334%

Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar (APK) menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka partisipasi murni (APM) merupakan angka yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka partisipasi murni (APM) selalu lebih rendah dibandingkan dengan APK, karena pembilang APM lebih kecil dari pembilang APK sementara pembagiannya sama. APM membatasi usia siswa sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil. APM yang mendekati nilai 100 menunjukkan bahwa hampir semua penduduk bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya.

Berdasarkan tabel 4.4 terdapat 21 indikator sasaran yang dicantumkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2021. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menunjukkan target sebesar 50% dan realisasi sebesar 50,20%. Maka APK PAUD sudah melampaui target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Persentase tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada siswa Sekolah Dasar (SD) yang berumur kurang dari 7 tahun.

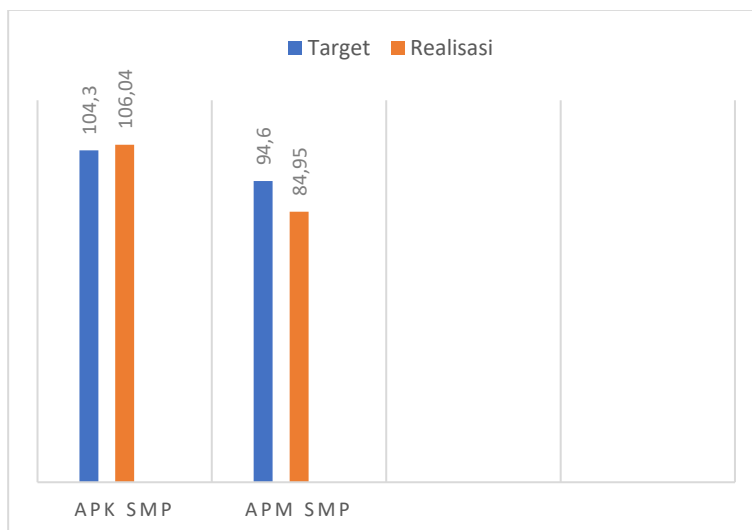
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar menunjukkan target sebesar 113% dan realisasi sebesar 105,98%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar menunjukkan target sebesar 108,50% dan realisasi sebesar 99,64%.



Gambar 4. 2 APK dan APM SD/MI Kota Bogor Tahun 2021

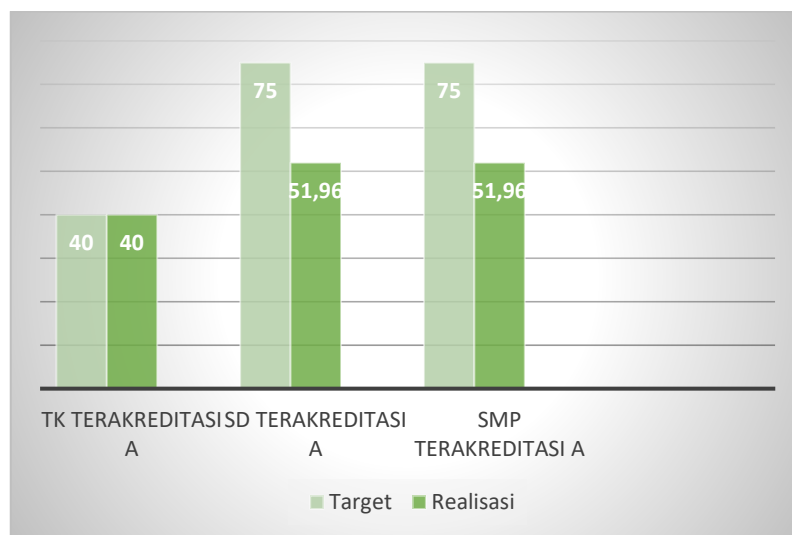
Pada gambar 4.2 terlihat bahwa APK SD/MI pada tahun 2021 di Kota Bogor telah mencapai 105,98% (lebih dari 100%). Artinya terdapat siswa, baik lebih muda maupun lebih tua yang berusia di luar batasan usia sekolah dasar (kurang dari 7 tahun dan atau lebih dari 12 tahun). Hal ini dimungkinkan banyak masyarakat di wilayah Kota Bogor yang menyekolahkan anaknya ke tingkat sekolah dasar pada usia 5-6 tahun, disini laun maish terdapat abak yang usianya di atas 12 tahun tetapi masih duduk di bangku SD/MI. Kemungkinan yang lain adalah terdapat beberapa anak usia SD yang berasal dari luar Kota Bogor bersekolah di Kota Bogor pada jenjang SD. Meskipun hanya 5,98% namun kondisi tersebut tetap harus menjadi perhatian Kota Bogor karena setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan untuk angka partisipasi murni (APM) pada tahun 2021 di Kota Bogor menunjukkan angka sebesar 99,64% (kurang dari 100%). Hal ini terjadi karena adanya perubahan regulasi diantaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru dengan sistem domisili (zonasi). Maka jumlah siswa yang drai luar Kota Bogor menurun.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan target sebesar 104,30% dan realisasi sebesar 106,04%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar menunjukkan target sebesar 94,60% dan realisasi sebesar 84,95%.



Gambar 4. 3 APK dan APM SMP/MTs Kota Bogor Tahun 2021

Sementara itu, untuk jenjang SMP, pada tahun 2021 di Kota Bogor APK SMP sederajat mencapai 106,04%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 13-15 tahun sudah 100% bersekolah dan 6,04% siswa SMP di Kota Bogor yang berasal dari luar Kota Bogor dan ada siswa SMP diluar batas usia SMP yang bersekolah di jenjang SMP. Sedangkan tidak tercapainya target APM SMP terjadi karena adanya perubahan regulasi diantaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru dengan sistem domisili (zonasi). Maka jumlah siswa yang drai luar Kota Bogor menurun.



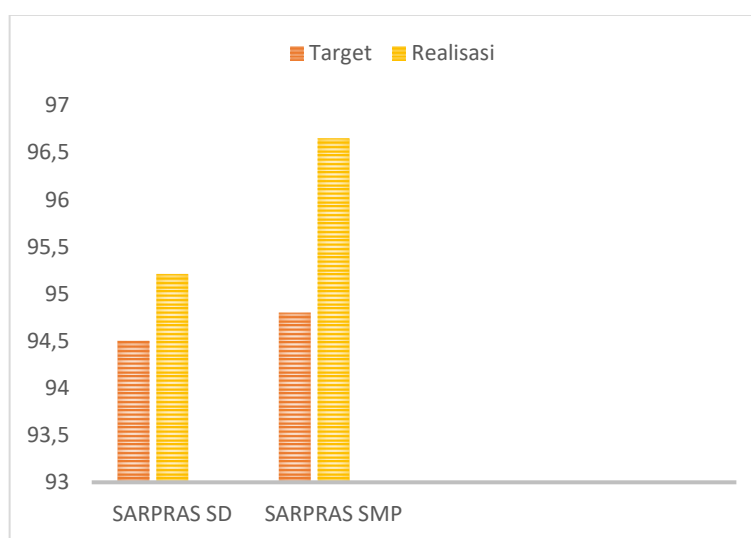
Gambar 4. 4 TK, SD, SMP Terakreditasi A

Sampai tahun 2021 terdapat 150 satuan pendidikan TK. Sebanyak 60 TK sudah terakreditasi A. Untuk jenjang SD dari 268 satuan pendidikan SD, sebanyak 201 satuan pendidikan SD sudah terakreditasi A, dan untuk jenjang SMP dari 123 satuan pendidikan SMP, terdapat 95 sekolah SMP yang sudah terakreditasi A. Indikator sasaran SD terakreditasi A dan SMP terakreditasi A belum memenuhi target yang sudah ditetapkan karena pembinaan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan

kesadaran diri bahwa pemenuhan standar pendidikan adalah kewajiban belum terlaksana dengan baik.

Ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar mengajar, prasarana pendidikan berfungsi secara tidak langsung. Yang termasuk di dalam prasarana pendidikan adalah tanah, halaman, pagar, tanaman, Gedung sekolah, jaringan air,dll. Sedangkan sarana pendidikan berfungsi langsung terhadap proses belajar mengajar, contohnya alat pelajaran, alat peraga dan media pendidikan.

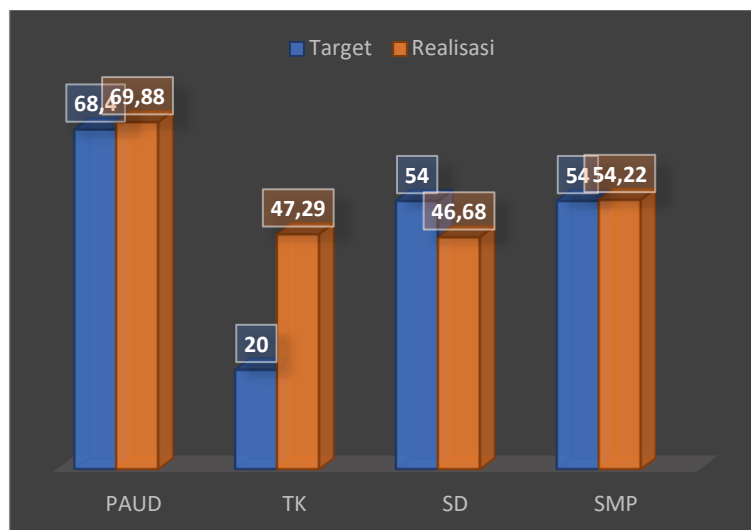
Ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ruang kelas yang nyaman merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung terciptanya suasana belajar mengajar yang kondusif.



Gambar 4. 5 Sarana dan Prasarana yang memadai

Pada tahun 2021, ruang kelas jenjang SD yang berkondisi baik atau memadai sejumlah 2.721 ruang dari total ruang SD sebanyak 2.852 ruang kelas. Sedangkan untuk jenjang SMP untuk ruang kelas yang berkondisi baik atau memadai sejumlah 792 ruang dari keseluruhan ruang kelas SMP sejumlah 833 ruang kelas. Dilihat dari target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor dan realisasi yang sudah tercapai oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor menyatakan bahwa indikator sasaran untuk persentase sarana dan prasarana jenjang SD dan SMP sudah memenuhi target, artinya Dinas Pendidikan Kota Bogor berhasil menyesuaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh setiap sekolah.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional dan internasional.



Gambar 4. 6 Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik

Indikator persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi minimal S1 sudah tercapai, dari 1.468 pendidik PAUD yang sudah menamatkan S1 sebanyak 1.023 pendidik. Namun masih ada tenaga pendidik PAUD yang belum menamatkan S1 pada PAUD Non Formal (SPS), dikarenakan keberadaan PAUD non formal didirikan oleh masyarakat sehingga para pendidiknya masih banyak lulusan SMA. Untuk itu Dinas Pendidikan terus melatih pendidik yang masih lulusan SMA dengan diklat dasar, lanjutan dan mahir, sehingga diharapkan mengajar sesuai dengan aturan yang diterapkan.

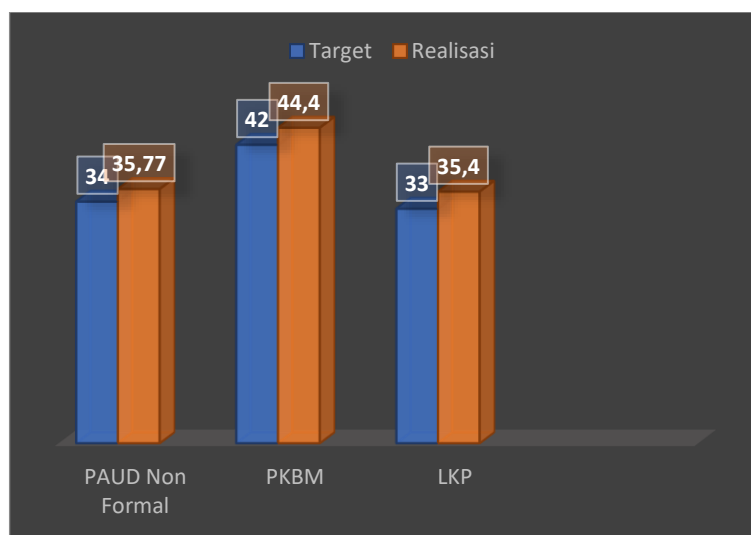
Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi dengan target 20% dan realisasi sebesar 47,29% indikator sasaran ini sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pendidik TK di Kota Bogor berjumlah 805 pendidik, dengan 243 pendidik diantaranya sudah bersertifikasi. Untuk pendidik jenjang SD yang sudah mendapatkan sertifikasi sebanyak 2.382 orang dengan total jumlah pendidik SD se Kota Bogor 4.408 pendidik. Masih ada tenaga pendidik yang belum mendapatkan sertifikasi sehingga realisasi yang dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor belum memenuhi target yang ditetapkan. Untuk pendidik SMP yang sudah memiliki sertifikasi sebanyak 1.227 dari jumlah guru sebanyak 2.150 pendidik capaian jenjang SMP.

Jumlah pendidik tutor berprestasi adalah yang memiliki kinerja diatas standar nasional pendidik mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional, menghasilkan karya kreatif atau inovatif dan setiap tahunnya dilombakan baik tingkat kota/provinsi dan internasional. Sehubungan dengan pada tahun 2021 terjangkit wabah covid-19 maka pelaksanaan guru berprestasi yang biasanya diadakan mulai tingkat kota, provinsi dan nasional ditiadakan.

Ujian nasioanl bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada jenjang satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan

(SKL). Ujian nasional sebagai subsistem penilaian dalam standar nasional pendidikan (SNP) menjadi salah satu tolak ukur pencapaian SNP dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Sesuai surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan peserta didik dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021/2022 bahwa kelulusan peserta didik ditentukan melalui ujian sekolah yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru.

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang serta berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Tenaga kependidikan non formal adalah tenaga kerja yang menangani pendidikan non formal yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran melibatkan unsur tenaga kependidikan dan unsur peserta didik.



Gambar 4. 7 Pendidikan Non Formal

Dari jumlah PAUD non formal yang sudah terakreditasi sebanyak 78 sekolah dari jumlah keseluruhan 218 sekolah PAUD non formal yang ada di Kota Bogor. Persentase PAUD non formal yang terakreditasi dengan target yang ditetapkan sebesar 34% dan realisasi sebesar 35,77% sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Untuk jenjang PKBM sampai tahun 2021 yang sudah terakreditasi sebanyak 16 lembaga dari total jumlah Lembaga sebanyak 36 lembaga. Target indikator sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor sebanyak 42% dan realisasi sebesar 44,40%, hal ini sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pada lembaga kursus pendidikan (LKP) sampai tahun 2021 yang sudah terakreditasi sebanyak 34 lembaga dari jumlah LKP sebanyak 96 lembaga. Apabila dilihat dari target indikator sasaran yang sudah

ditetapkan pendacapaian yang dilakukan sudah melampaui dari target yang di tetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Dalam perlombaan siswa dapat melatih otak untuk berfikir lebih yang menjadikan siswa lebih kreatif. Ketangkasan juga bisa diasah dalam mengikuti perlombaan, yang menjadikan siswa cepat tanggap dalam suatu permasalahan.meningkatkan kecerdasan pada siswa dan bersemangat dalam berkompetisi. Siswa menjadi semangat ingin juara dalam berkompetisi dan ingin mengikuti lomba-lomba berikutnya. Dengan semangatnya siswa akan sering mengikuti lomba dan otomatis akan melatih kecerdasan pada siswa.

Tabel 4. 5 Prestasi Siswa Per Jenjang

Jenjang Prestasi	Jumlah
Jumlah Siswa Berprestasi	
Tingkat Provinsi	20
Tingkat Nasional	43
Tingkat Internasional	63

Pada tahun 2021 jumlah siswa yang mengikuti lomba dan memenangkan prestasi baik tingkat provinsi, nasional dan internasional melampaui target yang telah ditetapkan. Perlombaan yang diikuti diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun dari swasta sehingga banyak kesempatan siswa untuk mengikutinya.

#### 4.2.3 Capaian Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan Kota Bogor Berdasarkan *Value For Money*

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *value for money* yaitu suatu metode pengukuran kinerja organisasi dengan minimal 3 aspek yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

##### 1. Ekonomi

Berikut rumus untuk menghitung tingkat ekonomi menurut Mahmudi (2010:84) :

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi anggaran

Nilai Input : Anggaran pengeluaran

Kriteria tingkat ekonomi menurut Mahsun (2018:186) adalah :

- Jika diperoleh nilai perhitungan < 100% maka dinyatakan ekonomis
  - Jika diperoleh nilai perhitungan = 100% maka dinyatakan ekonomis berimbang
  - Jika diperoleh nilai perhitungan > 100% maka dinyatakan tidak ekonomis
- Analisi perhitungan ekonomi untuk seluruh kegiatan pada Dinas Pendidikan

Kota Bogor Tahun 2021 akan diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 6 Perhitungan Nilai Ekonomis Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Uraian	Nilai Input	Input	% Tingkat Ekonomis	Ket.
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	596.731.472.015,00	567.742.497.174,00	95%	Ekonomis
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>365.147.216.017,00</b>	<b>353.680.893.775,00</b>	<b>97%</b>	Ekonomis
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	365.126.122.017,00	353.660.753.775,00	<b>97%</b>	Ekonomis
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	21.094.000,00	20.140.000,00	95%	Ekonomis
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.006.498.600,00</b>	<b>807.319.676,00</b>	<b>80%</b>	<b>Ekonomis</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.195.600,00	97.454.200,00	99%	Ekonomis
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.500.000,00	15.500.000,00	100%	Ekonomis Berimbang
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.425.000,00	93.075.000,00	90%	Ekonomis
	Penyediaan Barang Cekatan dan Penggandaan	107.080.000,00	105.310.000,00	98%	Ekonomis
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	682.298.000,00	495.980.476,00	73%	Ekonomis
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>383.918.300,00</b>	<b>378.500.450,00</b>	99%	<b>Ekonomis</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	383.918.300,00	378.500.450,00	99%	Ekonomis



No.	Uraian	Nilai Input	Input	% Tingkat Ekonomis	Ket.
<b>4</b>	<b>Penyedia Jasa Penunjang Pemerintah Daerah</b>	<b>1.250.498.072,00</b>	<b>963.135.020,00</b>	<b>77%</b>	<b>Ekonomis</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	468.000.000,00	198.835.986,00	42%	Ekonomis
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	782.498.072,00	764.299.034,00	98%	Ekonomis
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.105.250.000,00</b>	<b>1.091.580.281,00</b>	<b>99%</b>	<b>Ekonomis</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.060.000,00	121.845.800	95%	Ekonomis
	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	246.060.000,00	245.414.200,00	100%	Ekonomis Berimbang
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	731.150.000,00	724.320.281,00	99%	Ekonomis
<b>6</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>151.863.995.701,00</b>	<b>144.670.282.966</b>	<b>95%</b>	<b>Ekonomis</b>
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	12.214.704.566,00	11.182.892.250,00	92%	Ekonomis
	Penambahan Ruang Kelas Baru	606.910.000,00	589.637.834,00	97%	Ekonomis

No.	Uraian	Nilai Input	Input	% Tingkat Ekonomis	Ket.
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	400.600.000,00	397.973.786,00	99%	Ekonomis
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.886.633.457,00	2.846.868.367,00	99%	Ekonomis
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5.629.862.820,00	5.442.931.205,00	96%	Ekonomis
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	221.721.763,00	221.277.763,00	100%	Ekonomis Berimbang
	Pengadaan Mebel Sekolah	3.067.309.700,00	2.896.527.490,00	94%	Ekonomis
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.418.440.000,00	2.418.440.000,00	100%	Ekonomis Berimbang
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	595.065.800,00	451.608.600,00	76%	Ekonomis
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	53.810.000,00	53.679.200,00	100%	Ekonomis Berimbang
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.866.172.364,00	4.797.317.343,00	99%	Ekonomis
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	233.305.800,00	228.842.800,00	98%	Ekonomis
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	163.313.600,00	145.810.800,00	89%	Ekonomis
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	292.388.000,00	279.992.800,00	96%	Ekonomis
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	118.213.758.594,00	112.738.789,00	95%	Ekonomis

No.	Uraian	Nilai Input	Input	% Tingkat Ekonomis	Ket.
<b>7</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>50.313.129.505,00</b>	<b>44.785.820.465,00</b>	<b>89%</b>	<b>Ekonomis</b>
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	2.379.255.000,00	1.709.664.341,00	72%	Ekonomis
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	314.446.000,00	305.645.124,00	97%	Ekonomis
	Pengadaan Mebel Sekolah	1.091.958.500,00	993.642.771,00	97%	Ekonomis
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6.811.130.000,00	6.800.140.000,00	100%	Ekonomis Berimbang
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	313.528.000,00	291.636.000,00	93%	Ekonomis
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.297.168.000,00	1.258.086.900,00	97%	Ekonomis
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.862.869.270,00	2.749.530.342,00	96%	Ekonomis
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.138.359.000,00	1.066.721.400,00	94%	Ekonomis
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	230.702.000,00	211.613.000,00	92%	Ekonomis
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	400.080.600,00	340.482.800,00	85%	Ekonomis
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS	33.545.633.135,00	29.058.637.786,00	87%	Ekonomis
<b>8</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>12.090.886.820,00</b>	<b>9.845.957.841,00</b>	<b>81%</b>	<b>Ekonomis</b>

No.	Uraian	Nilai Input	Input	% Tingkat Ekonomis	Ket.
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	300.000.000,00	298.955.909,00	100%	Ekonomis Berimbang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	305.000.000,00	305.000.000,00	100%	Ekonomis Berimbang
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	110.924.624,00	103.645.936,00	93%	Ekonomis
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	2.387.970.396,00	2.371.083.396,00	99%	Ekonomis
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	486.217.800,00	406.098.000,00	84%	Ekonomis
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	36.574.000,00	36.574.000,00	100%	Ekonomis Berimbang
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	8.464.200.000,00	6.323.700.000,00	75%	Ekonomis
<b>9</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>13.570.079.000</b>	<b>11.519.906.700</b>	<b>85%</b>	Ekonomis
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30.000.000,00	30.000.000,00	100%	Ekonomis Berimbang
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2.967.060.000,00	2.594.806.500,00	87%	Ekonomis
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	550.780.000,00	550.780.000,00	100%	Ekonomis Berimbang
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	843.139.000,00	838.817.000,00	99%	Ekonomis
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	9.179.100.000,00	7.505.503.200,00	82%	Ekonomis
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.456.988.100,00</b>	<b>2.244.490.590,00</b>	<b>91%</b>	Ekonomis

No.	Uraian	Nilai Input	Input	% Tingkat Ekonomis	Ket.
10	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.456.988.100,00	2.244.490.590,00	91%	Ekonomis
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.456.988.100,00	2.244.490.590,00	91%	Ekonomis
		<b>599.188.460.115,00</b>	<b>569.986.987.764,00</b>	<b>95%</b>	<b>Ekonomis</b>

Sumber : Data diolah, 2023

Hasil analisis data mengenai perhitungan ekonomi kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Jumlah Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2021 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi

Kriteria	Jumlah Kegiatan	Persentase
Ekonomis	41	79%
Ekonomis Berimbang	11	21%
Tidak Ekonomis	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah, 2023

## 2. Efisiensi

Berikut rumus untuk menghitung tingkat efisiensi menurut Mahmudi (2010:84) adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Output : Persentase hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan

Input : persentase nilai ekonomi

Kriteria tingkat ekonomi menurut Mahsun (2018:186) adalah :

- Jika diperoleh nilai perhitungan < 100% maka dinyatakan tidak efisiensi
- Jika diperoleh nilai perhitungan = 100% maka dinyatakan efisiensi berimbang
- Jika diperoleh nilai perhitungan > 100% maka dinyatakan efisiensi

Analisis perhitungan efisiensi untuk seluruh kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun 2021 akan diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 8 Perhitungan Nilai Efisiensi Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2021

No.	Uraian	Output	Input	% Tingkat Efisiensi	Ket.
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>				
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	97%	103%	Efisien
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	95%	105%	Efisien
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99%	101%	Efisien
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	Efisien Berimbang
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	90%	111%	Efisien
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	98%	102%	Efisien
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	73%	137%	Efisien
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85%	99%	86%	Tidak Efisien
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	42%	238%	Efisien
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	98%	102%	Efisien
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85%	95%	89%	Tidak Efisien

No.	Uraian	Output	Input	% Tingkat Efisiensi	Ket.
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85%	100%	85%	Tidak Efisien
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85%	99%	86%	Tidak Efisien
<b>6</b>	<b>Pengadaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>				
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	113%	92%	123%	Efisien
	Penambahan Ruang Kelas Baru	113%	97%	117%	Efisien
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	113%	99%	114%	Efisien
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	113%	99%	114%	Efisien
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	113%	96%	118%	Efisien
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	113%	100%	113%	Efisien
	Pengadaan Mebel Sekolah	113%	94%	120%	Efisien
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	113%	100%	113%	Efisien
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	113%	76%	149%	Efisien
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	113%	100%	113%	Efisien
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	113%	99%	114%	Efisien
	Pengembangan Karir dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	113%	98%	115%	Efisien
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	113%	89%	127%	Efisien
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	113%	96%	118%	Efisien
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	113%	95%	119%	Efisien
<b>7</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	104%	72%	145%	Efisien

No.	Uraian	Output	Input	% Tingkat Efisiensi	Ket.
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	104%	97%	107%	Efisien
	Pengadaan Mebel Sekolah	104%	97%	107%	Efisien
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	104%	100%	104%	Efisien
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	104%	93%	112%	Efisien
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	104%	97%	107%	Efisien
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	104%	96%	108%	Efisien
	Pengembangan Karir dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	104%	94%	111%	Efisien
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	104%	92%	113%	Efisien
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	104%	85%	122%	Efisien
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	104%	87%	120%	Efisien
<b>8</b>	<b>Pengelolaan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD)</b>				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	100%	100%	100%	Efisien Berimbang
	Rehabilitasu Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ RuangGuru PAUD	100%	100%	100%	Efisien Berimbang
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100%	93%	108%	Efisien
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	100%	99%	101%	Efisien



No.	Uraian	Output	Input	% Tingkat Efisiensi	Ket.
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	100%	84%	119%	Efisien
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100%	100%	100%	Efisien Berimbang
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	100%	75%	133%	Efisien
<b>9</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	Efisien Berimbang
	Penyediaan Biaya PersonilPeserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	100%	87%	115%	Efisien
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendiidkan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	Efisien Berimbang
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolag Nonformal/Kesetaraan	100%	99%	101%	Efisien
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100%	82%	122%	Efisien
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>				
<b>10</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100%	91%	110%	Efisien

Sumber : Data diolah, 2023

Hasil analisis data mengenai perhitungan efisiensi kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 9 Jumlah Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2021 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi

Kriteria	Jumlah Kegiatan	Persentase
Efisien	42	80%
Efisien Berimbang	6	12%
Tidak Efisien	4	8%
<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah, 2023

### 3. Efektivitas

Berikut rumus untuk menghitung tingkat efektivitas menurut Mahmudi (2010:84) adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan :

*Outcome* : Persentase dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan

*Output* : persentase hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan

Dengan Kriteria menurut Mahsun (2020:187) adalah :

- Jika diperoleh nilai perhitungan < 100% maka dinyatakan tidak efektif
- Jika diperoleh nilai perhitungan = 100% maka dinyatakan efektivitas berimbang
- Jika diperoleh nilai perhitungan > 100% maka dinyatakan efektif

Analisis perhitungan efektivitas untuk seluruh kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun 2021 akan diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 10 Perhitungan Nilai Efektivitas Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2021

No.	Uraian	Output	Outcome	% Tingkat Efektivitas	Ket.
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>				
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang

No.	Uraian	Output	Outcome	% Tingkat Efektivitas	Ket.
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85%	100%	118%	Efektif
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85%	85%	100%	Efektivitas Berimbang
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85%	85%	100%	Efektivitas Berimbang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85%	85%	100%	Efektivitas Berimbang
<b>6</b>	<b>Pengadaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>				
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	113%	113%	100%	Efektivitas Berimbang
	Penambahan Ruang Kelas Baru	113%	113%	100%	Efektivitas Berimbang
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	113%	113%	100%	Efektivitas Berimbang

No.	Uraian	Output	Outcome	% Tingkat Efektivitas	Ket.
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	113%	113%	100%	Efektivitas Berimbang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	113%	113%	100%	Efektivitas Berimbang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	113%	113%	100%	Efektivitas Berimbang
	Pengadaan Mebel Sekolah	113%	113%	100%	Efektivitas Berimbang
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	113%	113%	100%	Efektivitas Berimbang
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	113%	113%	100%	Efektivitas Berimbang
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	113%	113%	100%	Efektivitas Berimbang
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	113%	113%	100%	Efektivitas Berimbang
	Pengembangan Karir dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	113%	113%	100%	Efektivitas Berimbang
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	113%	113%	100%	Efektivitas Berimbang
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	113%	113%	100%	Efektivitas Berimbang
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	113%	113%	100%	Efektivitas Berimbang
<b>7</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	104%	110%	106%	Efektif
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	104%	105%	101%	Efektif
	Pengadaan Mebel Sekolah	104%	104%	100%	Efektif Berimbang
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	104%	110%	106%	Efektif
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	104%	113%	109%	Efektif

No.	Uraian	Output	Outcome	% Tingkat Efektivitas	Ket.
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	104%	104%	100%	Efektif Berimbang
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	104%	105%	101%	Efektif
	Pengembangan Karir dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	104%	104%	100%	Efektif Berimbang
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	104%	113%	109%	Efektif
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	104%	110%	106%	Efektif
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	104%	110%	106%	Efektif
<b>8</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100%	110%	106%	Efektif
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	100%	100%	101%	Efektivitas Berimbang
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	100%	105%	101%	Efektif
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	100%	100%	133%	Efektivitas Berimbang
<b>9</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaran</b>				

No.	Uraian	Output	Outcome	% Tingkat Efektivitas	Ket.
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>				
<b>10</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100%	100%	100%	Efektivitas Berimbang

Sumber : Data diolah, 2023

Hasil analisis data mengenai perhitungan efektivitas kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 11 Jumlah Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2021 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas

Kriteria	Jumlah Kegiatan	Persentase
Efektif	11	21%
Efektivitas Berimbang	41	79%
Tidak Efektif	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>

### 4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data untuk menghitung pengukuran capaian kinerjanya, peneliti mengambil tujuan dan sasaran pada Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2021 yang tertera pada laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pengukuran pada 10 program yang dimana setiap program memiliki uraian kegiatan atau uraian programnya masing-masing. 10 program yang dilaksanakan yaitu administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, pengadaan pendidikan sekolah dasar, pengadaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengadaan pendidikan anak usia dini, pengadaan pendidikan non formal/kesetaraan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. Capaian kinerja dan keuangan tahun 2021 pada dinas pendidikan Kota Bogor berdasarkan 10 program yang sudah dilaksanakan menunjukkan pencapaian kinerja anggaran yang sangat baik serta menunjukkan persentase anggaran sebesar 95,13%. Hal ini berarti kinerja anggaran Dinas Pendidikan Kota Bogor dikatakan berhasil.

Berdasarkan analisis *value for money* terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor yang menilai aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

#### 1. Ekonomi

Pada tahun 2021, keseluruhan kegiatan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor memperoleh perhitungan ekonomi yang sangat baik. Hasil analisis menunjukkan dari 10 program yang terdiri atas 52 uraian program atau kegiatan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor telah ekonomis dengan jumlah kegiatan 41 (79%), ekonomis berimbang dengan jumlah kegiatan 11 (21%) dan tidak ekonomis 0 kegiatan (0%). Artinya pada program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan, Dinas Pendidikan Kota Bogor mampu menggunakan dana dengan hemat yaitu kurang dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp599.188.460.115,00 dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp569.986.987.764,00. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan programnya, Dinas Pendidikan Kota Bogor telah berhemat sebesar Rp29.201.472.351,00. Dengan nilai persentase 95% tingkat capaian nilai ekonomis.

Pada tabel 4.5 hasil analisis menunjukkan bahwa dari 52 uraian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor pada tahun 2021, terdapat 41 kegiatan (79%) dikatakan ekonomis yaitu nilai ekonomi yang diperoleh kurang dari 100%, artinya Dinas Pendidikan Kota Bogor mampu meminimalisir pemborosan dalam penggunaan dana. Selain itu terdapat 11 kegiatan (21%) dikatakan ekonomis berimbang yaitu nilai ekonomi yang diperoleh sama dengan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

## 2. Efisiensi

Perhitungan efisiensi pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2021 dapat dikatakan cukup efisien. Kinerja suatu organisasi dikatakan efisien apabila tingkat perhitungan efisien memperoleh hasil lebih dari 100%. Pada tabel 4.7 hasil analisis menunjukkan dari 52 uraian kegiatan atau program, yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2021, terdapat 42 kegiatan dari 52 kegiatan yang dinyatakan efisien. Dinas Pendidikan Kota Bogor mampu menghasilkan kerja yang maksimal dengan penggunaan anggaran yang hemat melalui 42 kegiatan yang telah dinyatakan efisien, yang dimana 42 kegiatan tersebut memperoleh nilai tingkat efisiensi lebih dari 100%.

## 3. Efektivitas

Perhitungan efektivitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja berupa program ataupun kegiatan yang dijalankan telah mencapai tujuan. Perhitungan efektivitas pada program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2021 berdasarkan tabel 4.9 hasil analisis menunjukkan dari 52 uraian kegiatan terdapat 11 kegiatan yang dinyatakan efektif yaitu hasil nilai perolehannya lebih dari 100% artinya Dinas Pendidikan sudah sangat baik dalam melaksanakan programnya. Hasil analisis tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat 41 kegiatan yang menyatakan efektivitas berimbang yaitu kegiatan yang tingkat efektivitasnya sama dengan 100% artinya hasil kinerja 41 kegiatan tersebut sesuai dengan target yang diharapkan.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja dengan *value for money* berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendidikan Kota Bogor, penelitian ini menggunakan data laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) pada tahun 2021 di Dinas Pendidikan Kota Bogor menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk selalu melakukan inovasi serta merangkai program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penggabungan dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam rencana kinerja tahunan (RKT) yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan meliputi rencana kinerja tahunan, kualitas perencanaan kinerja tahunan, dan implementasi perencanaan kinerja tahunan. Dalam dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan didalamnya terdapat dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan rencana kerja anggaran kementerian Lembaga (RKAKL). Yang dimana itu semua sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dana serapan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD sudah digunakan dengan baik. Alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2021 sebesar Rp599.188.460.115,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp569.986.987.764,00. Realisasi anggaran yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor tidak melebihi alokasi anggaran yang sudah ditetapkan.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat capaian kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Bogor menyatakan bahwa kinerja anggaran Dinas Pendidikan Kota Bogor yang ditinjau berupa alokasi anggaran dan realisasi pengeluaran secara umum telah menunjukkan pencapaian kinerja anggaran yang baik. Dimana kegiatan pengelolaan anggaran menunjukkan pencapaian kinerja yang optimal yaitu sebesar 95,13% untuk tahun 2021. Selain itu, pengukuran capaian kinerja

Dinas Pendidikan Kota Bogor yang ditinjau berupa visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD sudah selaras dengan program-program yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Indikator sasaran kegiatan secara umum telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Terdapat 21 indikator sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Dari 21 indikator sasaran, 6 indikator sasaran diantaranya menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai belum optimal yang artinya realisasi yang dicapai tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa indikator sasaran kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor belum sepenuhnya optimal.

3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kota Bogor berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 dengan pendekatan *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas menyatakan bahwa 10 program yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor mempunyai 52 kegiatan. Pada tahun 2021, hasil perhitungan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor memperoleh perhitungan yang sangat baik. Anggaran yang sudah dialokasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berasal dari APBN dan APBD sudah digunakan dengan sebaik-baiknya. Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah menekan angka realisasi pengeluaran, sehingga semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tidak ada yang tidak ekonomis. Pada tahun 2021, untuk perhitungan efisiensi pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor dapat dikatakan cukup efisien. Kinerja suatu organisasi dikatakan efisien apabila tingkat perhitungan efisien memperoleh hasil lebih dari 100%. Berdasarkan perhitungan tingkat efisien terdapat 42 kegiatan dinyatakan efisien, 6 kegiatan dinyatakan efisien berimbang dan 4 kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Secara keseluruhan tingkat efisien sudah cukup optimal namun untuk 4 kegiatan yang tidak efisien harus ditinjau ulang agar dapat optimal secara keseluruhan. Perhitungan efektivitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja berupa program maupun kegiatan yang dijalankan telah mencapai tujuan. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas yang dilakukan oleh peneliti pada Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2021 menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor secara keseluruhan sudah efektif. Yang artinya output yang dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah memberikan Outcome kepada masyarakat yang merasakan kinerja Dinas Pendidikan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi Dinas Pendidikan Kota Bogor. Saran tersebut mencakup :

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dibuat oleh Dinas Pendidikan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur. Di dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri atas Indikator Kinerja

Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL). Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah mempunyai semua dokumen yang tercantum dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun, Dinas Pendidikan Kota Bogor masih harus melakukan pembaharuan terhadap dokumen tersebut. Seperti pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada laporan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, namun apabila dilihat dari judul yang digunakan itu belum melakukan pembaharuan. Karena judul yang digunakan masih “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” yang seharusnya sudah dirubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Capaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor masih harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena masih ada indikator sasaran yang persentase realisasinya belum memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor.
3. Capaian kinerja keuangan menggunakan pendekatan *value for money* secara keseluruhan sudah sesuai dengan *value for money* yang mencakup 3E yaitu Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas. Namun masih ada beberapa kegiatan yang persentase capaiannya belum menyentuh 100% sehingga realisasi yang dihasilkan masih belum memenuhi target, sehingga perlu dilakukan penyesuaian ulang antara program dan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama diharapkan untuk mengadakan penelitian di tempat yang lain dengan tujuan dapat mengetahui kinerja dari setiap kedinasan yang akan diteliti. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk melakukan pengukuran kinerja tidak hanya diukur dengan pendekatan *value for money*, serta menambahkan teknik pengumpulan data berupa wawancara sehingga dapat mengetahui informasi secara lebih luas dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angga, R. (2020). *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bogor*. Skripsi. Universitas Pakuan
- Bastian. (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Biduri, S. (2018). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Defitri, Siska Yulia., dkk. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Sumatera Barat : Global Eksekutif Teknologi
- Dinas Pendidikan. (2021). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Bogor : Dinas Pendidikan
- Dr. Solehuddin.,MM. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Performance Analysis*. Yogyakarta : Absolute Media
- Dwinanda, Yosie. (2018). *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Fitriyah, Nur. (2020). *“Analisis Efektivitas Kinerja Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor*. Skripsi. Universitas Pakuan
- Garini, Nabilah Tyas. (2021). *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau*. Skripsi. Universitas Islam Riau
- Hadiyanti, Padla Aulia. (2017). *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pariwisata Dan Seni Budaya Kabupaten Oku Timur*.” Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang
- Halim, A. dan Kusufi M, S. (2018). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik : dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta : Salemba Empat
- Handayani, Monika. (2019). *Akuntansi Sektor Publik : Dilengkapi 100 Soal Latihan dan Jawaban*. Banjarmasin : POLIBAN PRESS
- Junius, Pascana. (2017). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Bkpsdmd.babelprov.go.id. Tersedia di: 05 Juni 2017. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah> (diakses 6 Januari 2023)
- Lie, Melati. (2015). *Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

- Mahsun, Mohamad. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Sulawesi Selatan : BPFE
- \_\_\_\_\_. (2020). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Buku Kompas
- Nordiawan, Deddi, Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang : Salemba Empat
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kota Bogor <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218392/perda-kota-bogor-no-3-tahun-2008>
- \_\_\_\_\_. Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207204/perda-kota-bogor-no-2-tahun-2010>
- \_\_\_\_\_. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/63139/perda-kota-bogor-no-6-tahun-2014>
- \_\_\_\_\_. Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Organisasi Perangkat <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/214204/perwali-kota-bogor-no-155-tahun-2021>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132909/permen-pan-rb-no-29-tahun-2010#:~:text=Permen%20PAN%20%26%20RB%20No.%2029,Instansi%20Pemerintah%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132909/permen-pan-rb-no-29-tahun-2010>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [https://jdih.menpan.go.id/data\\_puu/PERMEN%2053%202014.pdf](https://jdih.menpan.go.id/data_puu/PERMEN%2053%202014.pdf)

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar <https://www.bphn.go.id/data/documents/08pp047.pdf>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41515/perpres-no-29-tahun-2014>
- \_\_\_\_\_. Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173504/perpres-no-62-tahun-2021>
- Pratiwi, Elvina Dewi. (2017). *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Pada Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kowane Utara*. Skripsi. Universitas Haku Oleo
- Pratiwi, Windi. (2020). *Pengaruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Terhadap Peningkatan Kinerja Instansi Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Putri, Nur Zeni Amalia. (2020). *Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Riadi, Muchlisin. (2020). *Pengukuran Kinerja (Pengertian, Tujuan, Syarat Indikator, Model dan Proses)*. Kajianpustaka.com. Tersedia dari:29 Januari 2020.
- <https://www.kajianpustaka.com/2020/02/pengukuran-kinerja-pengertian-tujuan-syarat-model-dan-proses.html#:~:text=Pengukuran%20kinerja%20bertujuan%20untuk%20motivasi,tindakan%20yang%20diinginkan%20oleh%20organisasi>. (diakses pada 10 Januari 2023)
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT. Refika Aditama
- TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN [https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/tapmpr\\_6.pdf](https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/tapmpr_6.pdf)
- Widianto, Akbar Reyfotmatio Zakky, Arni, Karina. *Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Deputy Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB)*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Perbankan Vol 7, No 1 (2021) : 1-9
- Widiyastuti, Titik. *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bonyolali*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Wulansuci, Perpetua Saras. (2017). *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010*.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Prisila  
NPM : 022119111  
Alamat : Sindangbarang Sekolahan RT 04/ RW 05 No.12 Kel.  
Sindangbarang Kec. Bogor Barat Kota Bogor  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 30 April 2001  
Agama : Islam  
Pendidikan  
SD : SD Negeri Gunung Batu 2 Bogor  
SMP : SMP Negeri 6 Bogor  
SMA : SMA PESAT Bogor  
Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2023

Peneliti



(Putri Prisila)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Keterangan Magang



**PEMERINTAH KOTA BOGOR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan R.M Tirta Adhi Soerjo Nomor 2 - Telp./Fax. : (0251) - 8332775  
Bogor - 16161

#### SURAT - KETERANGAN

Nomor : 070/ 467 – Bakesbangpol

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor.  
Berdasarkan Surat dari : Wakil Dekan Bidang akademik dan Kemahasiswaan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor  
Nomor : 292/WD.1/FEB-UP/IV/2023  
Tanggal: 06 April 2023  
Perihal : Permohonan Riset/Magang/Data

Menerangkan bahwa :	
a. Nama	: Putri Prisila <span style="float: right;">NPM : 022119111</span>
b. Telepon / E-Mail	: 0895396181842
c. Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
d. Alamat	: Sindangbarang Sekolahan Rt 04/05 Sindangbarang Bogor Barat Kota Bogor
e. Peserta	: 1 (Orang)
f. Maksud	: Permohonan Riset/Magang/Data
g. Untuk keperluan	: Tugas Kuliah
h. Lokasi	: Kota Bogor
i. Lembaga/Instansi Yang Dituju	: Dinas Pendidikan Kota Bogor

1. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang diperlukan;
2. Mohon instansi tersebut dapat mengawasi/ memonitor dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
3. Dosen/Guru Pembimbing bertanggungjawab agar ikut memberikan pengawasan dan pembinaan kepada mahasiswa/i, siswa/i yang melaksanakan Pra-Riset/Penelitian/Permohonan Data/Observasi/PKL/Magang serta melaporkan perkembangannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor secara tertulis;
4. Agar di dalam pelaksanaan kegiatannya tetap mengikuti Prosedur Protokol Kesehatan, selama masa Pandemi Covid-19 di Kota Bogor;
5. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sampai dengan 03 Juni 2023

Bogor, 03 Mei 2023  
a.n. Kepala  
Kepala Bidang Kewaspadaan  
Nasional Dan Penanganan Konflik

  
**Drs. Margahit Sinaga, M.M.**  
NIP. 196603181992031006